

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI NUSA TENGGARA TIMUR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI NUSA TENGGARA TIMUR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI NUSA TENGGARA TIMUR

Tim Peneliti/Penulis : Tito Adonis
Djoko

Penyunting : Restu Gunawan

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-
Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, 1997

Cetakan ke I 1997

Dicetak oleh : CV. Putra Sejati Raya, Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Pebruari 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

PRAKATA

Pengenalan dan identifikasi terhadap hasil budaya merupakan suatu usaha yang sangat berharga sehingga perlu dijalankan secara terus menerus. Hal ini menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat identitas dan kesatuan nasional. Usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghayatan masyarakat terutama generasi muda terhadap warisan budaya.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa atau daerah. Untuk melestarikannya, dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Penerbitan buku berjudul *Sistem Pemerintahan Tradisional di Nusa Tenggara Timur* adalah upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

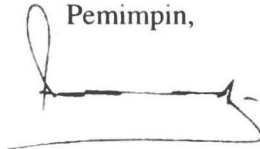
Kepada timu penulis dan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun swasta yang telah membantu sehingga terwujudnya karya ini, disampaikan terima kasih.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini belum memadai. Diharapkan kekurangan-kekurangan itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini ada manfaatnya bagi para pembaca serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Pebruari 1997

Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat

Pemimpin,



Soeyanto, BA
NIP. 130604670

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	i
PRAKATA	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Pendekatan Teori	5
1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Teknik Pengumpulan Data	9
Bab II Identifikasi Daerah Nusa Tenggara Timur	11
2.1 Lokasi dan Lingkungan alam	11
2.2 Kehidupan Ekonomi	18
2.3 Kehidupan Sosial Budaya	22
Bab III Kondisi Kebudayaan Penduduk di Nusa Tenggara Timur	25
3.1 Pangantar	25

3.2	Pola Perkembangan	26
3.3	Sistem Kekerabatan	28
3.4	Pemerintahan Kampung	34

Bab IV Lembaga Tradisional dan Mekanisme Kekuasaan

	Politik	42
4.1	Mekanisme Kekuatan dan Kekuasaan	42
4.1.1	DesaRubit, Kabupaten Sikka	42
4.1.2	Desa Moni, Kabupaten Ende	44
4.1.3	Desa Boti, Kabupaten Timor Tengah	46
4.2	Adat Istiadat dan Sistem Kekuasaan	47

Bab V Simpulan

55

Daftar Kepustakaan

64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Oleh Proyek P2NB, kami diminta untuk mengkaji sistem pemerintahan tradisional di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kajian ini bertujuan untuk memahami suatu mekanisme keteraturan sosial yang bersifat tradisional yang ada di wilayah itu. Melalui pemahaman itu, diharapkan dapat menjadi pegangan atau pedoman dalam melakukan pembinaan kebudayaan di dalam masyarakat.

Sesungguhnya, sistem pemerintahan tradisional dapat dilihat sebagai suatu sistem politik yang berlaku di lingkungan tertentu, dalam hal ini adalah propinsi Nusa Tenggara Timur. Maksud sistem politik di sini adalah suatu tatacara yang mengatur hubungan-hubungan kekuatan dan kekuasaan yang diterapkan pada orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat. Karena itu mengkaji sistem politik termasuk pula mengkaji lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan kekuatan dan kekuasaan.

Namun demikian, sistem politik yang dikaji dalam laporan ini sifatnya sangat terbatas dan belum berlaku secara universal. Artinya suatu sistem politik tertentu di suatu wilayah tertentu pula belum berlaku di wilayah yang lainnya. Oleh karena itu kami diberi batasan untuk mengkaji sistem pemerintahan tradisional di propinsi Nusa Tenggara

Timur. Akan tetapi batasan yang diberikan itu lebih bersifat administratif negara kesatuan Republik Indonesia daripada batasan-batasan kekuasaan dan kekuatan politik tradisional. Sehingga untuk mengkaji sistem pemerintahan tradisional, tidak mungkin dimulai dari batasan administratif. Namun demikian batasan administratif itu tidak dapat diabaikan dalam mengkaji bekerjanya suatu pemerintahan tradisional. Hal ini berkaitan dengan semakin intensifnya kontak-kontak kebudayaan akibat meningkatnya peranan sistem transportasi dan komunikasi. Oleh karena itu kami menyadari bahwa hampir tidak ada wilayah yang tidak tersentuh pengaruh dari luar di Wilayah Indonesia umumnya dan Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya. Dengan demikian walaupun pemerintahan yang bersifat lokal, atau dalam istilah tulisan ini pemerintahan tradisional hanya khusus berlaku bagi anggota suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi tidak dapat disangkal pengaruh pemerintahan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap ada.

Kami telah mencoba mengidentifikasi sistem pemerintahan tradisional yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Upaya ini kami lakukan untuk memahami seberapa banyak pemahaman tentang sistem pemerintahan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur serta sistem pemerintahan tradisional itu sendiri. Identifikasi yang telah kami lakukan itu menghasilkan pendapat bahwa pemerintahan tradisional selalu didasarkan atas pedoman-pedoman yang berorientasi pada nilai kesukubangsaan. Jadi, dari identifikasi itu, kebanyakan tulisan menyebutkan sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat suku bangsa. Misalnya sering kita mendengar ada sistem pemerintahan tradisional masyarakat Mentawai di Propinsi Sumatra Barat, atau sistem pemerintahan tradisional masyarakat Asmat di Irian Jaya, atau sistem pemerintahan tradisional masyarakat Baduy di Propinsi Jawa Barat.

Kalau diperhatikan sungguh-sungguh, akan ada pertanyaan penting berkenaan dengan batasan masyarakat sukubangsa itu sendiri. Kalau ditanyakan siapa sesungguhnya masyarakat Asmat? Apakah penduduk yang tinggal di Kecamatan Agats yang patut disebut orang Asmat, atau penduduk di Sawa-Erma yang lebih tepat disebut orang Asmat?

Kalau mengacu pada laporan-laporan yang telah dibuat missionari,

maka yang dimaksud masyarakat Asmat adalah penduduk yang tinggal di Kecamatan Sawaearma, Agats, Ats dan pantai Kasuari, Kabupaten Merauke. Jadi baik orang Sawaearma Maupun orang Agats, menurut kerangka pada missionaris, berhak mengaku sebagai orang Asmat.

Pengakuan ini terbatas apabila mereka berhadapan dengan orang-orang luar, atau setidaknya bukan orang yang tinggal di Kecamatan-kecamatan yang disebutkan diatas. Kenapa penduduk yang tinggal diempat Kecamatan tersebut dianggap sebagai satu kelompok sosial dengan nama Asmat? Kalau mengaju pada pertanyaan Murdock (lihat Mordock, 1948) bahwa penduduk yang tinggal di empat kecamatan itu mempunyai kesamaan pada unsur-unsur kebudayaannya. Oleh karena adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaannya, maka penduduk yang tinggal di empat kecamatan itu dikelompokkan menjadi satu suku bangsa.

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat suku Baduy. Siapa sesungguhnya yang disebut masyarakat suku Baduy? Menurut berbagai kalangan, sebutan itu umumnya datang dari luar. Sedangkan dikalangan mereka sendiri tidak pernah menyebutkan demikian. Dikalangan mereka lebih suka menyebut dirinya sesuai dengan tempat tinggal atau kampungnya. Misalnya orang Kanekes, orang Cibeo dan lain sebagainya. Dengan demikian kalau mengacu pada pengertian masyarakat suku bangsa seperti yang didefinisikan di atas, maka kajian mengenai pemerintahan tradisional harus mengambil kasus-kasus pada tingkat kampung atau desa. Hal ini penting artinya karena membicarakan mengenai pemerintahan tradisional harus mencakup batas-batas administrasi dan fisik yang seringkali tidak dapat dijelaskan kalau hanya pada pengertian masyarakat sukubangsa. Namun demikian kajian mengenai pemerintahan tradisional tidak hanya berhenti pada kampung atau desa, melainkan harus diabstraksikan menjadi satu masyarakat yang lebih luas. dalam konteks ini, baru pengertian masyarakat sukubangsa bisa digunakan untuk melihat pemerintahan tradisional yang mempunyai perbedaan-perbedaan dengan masyarakat dengan tata nilai nasional.

Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai perubahan-perubahan dalam pemerintahan tradisional di Nusa Tenggara Timur dalam melakukan penyesuaian terhadap tata aturan, norma dan nilai-nilai

yang lingkupnya nasional daripada bersifat lokal. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pemerintahan tradisional itu mempunyai implikasi dengan ketaatan penduduknya berperan serta dalam pembangunan.

1.2 Masalah

Tulisan tentang masyarakat dan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur memusatkan perhatiannya pada sistem pemerintahan tradisional, khususnya mengenai masalah-masalah perubahan yang terjadi di dalam kebudayaannya dan bagaimana respon warga masyarakat tersebut terhadap perubahan-perubahan yang telah terjadi atau sedang berlangsung di dalam masyarakatnya.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dan kebudayaan suku Nusa Tenggara Timur disebabkan karena warga suku Nusa Tenggara Timur telah mengalami kontak-kontak dengan sejumlah pihak yang berasal dari luar Irian. Pihak-pihak yang telah memacu perubahan pada masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah para penyebar agama katolik, para pedagang yang berasal dari propinsi lain di Indonesia dan aparat pemerintahan berikut pranata-pranata nasional yang merupakan hal yang baru dalam kehidupan dan kebudayaan suku-suku Nusa Tenggara Timur.

Perubahan-perubahan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar dapat mendorong kemajuan kebudayaan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dapat mengakibatkan munculnya dampak-dampak yang dapat menimbulkan masalah sosial bagi warga Nusa Tenggara Timur dan pemerintah setempat.

Selain itu aspek-aspek kehidupan yang menjadi sasaran kajian adalah aspek kehiduppan agama, kehidupan ekonomi tercakup didalamnya sistem mata pencarian dan tehnologi, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, serta sistem politik tradisional yang berkembang didalam masnyarakat Nusa Tenggara Timur masa kini.

1.3 Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan apa yang terjadi,

bagaimana respon warga masyarakat yang bersangkutan dan mengapa respon tersebut muncul. Tulisan ethnografi ini merupakan suatu studi yang terfokus pada aspek-aspek kehidupan tertentu di dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur yang relevan dengan unsur-unsur kehidupan baru yang masuk didalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

1.4 Kerangka Teori (ambil dari buku)

Dalam tulisan ini kami mencoba untuk menggunakan kerangka teori yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli antropologi. Tidak seluruh kerangka teori itu kami setuju dan kami gunakan dalam mengkaji pemerintahan tradisional, namun beberapa pendapatnya serta landasan berfikirnya kami bahas secara singkat dan inti sarinya untuk memperkuat landasan berfikir kami.

Maine dan Morgan menyatakan bahwa semua masyarakat manusia dimanapun mereka berada mengenal adanya sistem pemerintahan. Pernyataan itu terasa agak kurang berbobot karena tidak didukung oleh data yang akurat. Apalagi kalau diperhatikan bahwa masyarakat-masyarakat yang masih bersahaja (tribal) belum terlalu banyak diteliti oleh ahli-ahli zaman itu. Jadi, pada zaman Maine dan Morgan belum banyak deskripsi ethnografi yang dapat digunakan untuk membahas topik sistem pemerintahan masyarakat - masyarakat tribal.

Setelah banyak penelitian tentang masyarakat tribal atau bersahaja, malahan banyak dikalangan ahli antropologi meragukan adanya pemerintahan pada masyarakat yang bersahaja. Hasil penelitian Macleod misalnya menyatakan bahwa masyarakat di Yurok California dapat bertahan dan mengatur dirinya tanpa adanya negara atau dengan kata lain tidak ada pemerintahan atau organisasi politik. Radcliffe-Brown menunjukkan bahwa tidak ada pemerintahan yang mengatur anggota di masyarakat Andaman.

Sementara itu ada pendapat lain yang membahas mengenai ada tidaknya sistem pemerintahan pada masyarakat Tribal. Redfield misalnya mengatakan bahwa organisasi politik pada masyarakat yang paling bersahaja sangat sederhana, bahkan dinilai cenderung tidak ada. Kemudian Malinowski mengatakan bahwa pengelompokan-

pengelompokan berdasarkan politik pada masyarakat bersahaja tidak ada. Pemahaman mengenai sistem pemerintahan, organisasi politik serta hubungan-hubungan politik pada masyarakat tribal pada umumnya di peroleh dari etnografi-etnografi pada tipe-tipe masyarakat yang berburu dan meramu.

Walaupun demikian Fortes and Pritchard juga menyatakan bahwa pada masyarakat-masyarakat yang mata pencahariannya adalah beternak dan bercocok tanam secara sederhana dikategorikan sebagai masyarakat tanpa negara (*stateless societies*) yang dicirikan dengan tidak adanya pemerintahan.

Kalau ditilik lebih dalam, pernyataan-pernyataan para ahli itu umumnya mau membandingkan antara masyarakatnya dengan masyarakat yang ditelitinya. Menurut mereka masyarakat yang ditelitinya itu tidak menunjukkan ciri-ciri yang berlaku seperti masyarakat. oleh karena itu masyarakat primitif di anggap tidak mempunyai pemerintahan.

Menurut Fortes maupun Evans Pritchard, pemerintahan adalah kekuasaan yang terpusat yang bergerak secara administratif dan didukung oleh lembaga-lembaga hukum. Malinowski mengatakan bahwa organisasi politik selalu mempunyai ciri kekuasaan yang terpusat yang mengatur semua kegiatan anggota masyarakatnya. Namun demikian tidak ada satupun dari penulis itu yang mengkaitkan antara pemerintahan dan negara di satu pihak dengan kepemimpinan dan kekuasaan di pihak yang lain. Padahal, baik Redcliffe-Brown maupun Malinowski telah menyebutkan dengan jelas bahwa ada masyarakat-masyarakat yang bersahaja, masyarakatnya diatur oleh orangtua-orangtua atau seseorang yang dituakan, baik perempuan maupun laki-laki. Artinya walaupun dalam suatu masyarakat terjadi pengelompokan-pengelompokan tetapi setiap kelompok selalu ada pemimpinnya. Dengan kata lain keteraturan kekuasaan dan kekuatan setiap kelompok itu terpusat pada pemimpinnya.

Kami setuju dengan pendapat MacLeod bahwa dalam membicarakan masalah pemerintahan, tidak dapat melihatnya berdasarkan lembaga-lembaga tertinggi yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Tetapi dalam membicarakan masalah pemerintahan, harus memperhatikan kekuasaan yang terpusat. Karna itu kekuasaan terpusat

itu tidak harus terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga tetapi dapat pula orang-orang itu mempunyai pengaruh terhadap dan dapat diawasi secara langsung anggota masyarakat yang lainnya.

Dengan melihat pengertian tentang organisasi politik atau bentuk kekuasaan terpusat itu, maka untuk melihat sistem pemerintahan, organisasi politik dan hubungan politik pada masyarakat primitif tidak di perlukan menemukan lembaga-lembaga yang berkuasa atas orang-orang banyak. Dengan lain perkataan bahwa tidak perlu mencari kesamaan antara pengertian pemerintah di masyarakat moderen dengan masyarakat primitif.

Sesungguhnya para ahli secara umum setuju bahwa pengertian pemerintah adalah suatu aspek formal yang selalu melibatkan secara langsung mengawasi aktifitas anggota masyarakatnya yang diatur oleh seseorang maupun beberapa orang yang memiliki kekuatan khusus. Jadi pada masyarakat yang demikian itu, maka orang-orang tersebut dapat di katakan pimpinan. Tetapi masalahnya siapa mereka itu? Seberapa jauh pimpinan itu dapat menggunakan kekuasaan itu? Bagaimana mempertahankan kedudukannya dan seberapa jauh mereka dapat memutuskan suatu persoalan atas nama orang banyak. Dengan lain perkataan apakah seorang atau orang-orang khusus tersebut bisa disebut pemimpin dan kegiatannya sebagai suatu aktifitas politik.

Orang-orang yang merupakan aparat dalam pemerintah moderen mempunyai kekuatan dan hak-hak khusus. Hal ini dapat dilihat dari para pekerjanya yang profesional yang mendapat bayaran atau upah karena pelayanannya terhadap masyarakat. Beberapa dari mereka mendapatkan gengsi karena kedudukannya itu, bahkan ada diantara mereka yang julukan (*title*) yang karena melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Mereka dapat menjalankan karena adanya aturan-aturan dan aturan-aturan itu kadang-kadang mereka yang buat. Bahkan karena kedudukannya itu mereka dapat menggunakan kekuatan fisik (polisi dan tentara) untuk mempertahankan hukum yang berlaku.

Hak dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan sering dipandang sebagai suatu ciri organisasi politik moderen. Weber misalnya menyatakan bahwa perbedaan antara organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lainnya adalah kemampuannya dalam

menggunakan dan mempertahankan kekuatan fisik berdasarkan aturan. Demikian pula Mac Iver mengatakan kelebihan suatu pemerintahan adalah bagaimana pemerintah menggunakan kekuatannya sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Kesulitan untuk melihat sistem pemerintahan pada masyarakat tribal adalah karena ciri masyarakat itu umumnya adalah *egalitarian*. Artinya stratifikasi sosial didalam masyarakat itu tidak ada, kecuali didasarkan keahlian, tidak ada orang yang bekerja pada satu bidang tertentu sepanjang waktu (spesialisasi pekerjaan). Karena perbedaan ciri antara masyarakat moderen dan tribal, maka Tonnies secara tegas membedakannya dengan istilah *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. Demikian pula melalui corak hubungan sosialnya, Durkheim membedakan ciri antara masyarakat moderen dan masyarakat tribal menjadi solidaritas organik dan solidaritas mekanik.

Ahli-ahli antropologi kadang-kadang menekankan organisasi politik berdasarkan ciri yang sama. A.R. Radcliffe-Brown misalnya mengatakan bahwa di dalam mempelajari organisasi politik artinya bagaimana memelihara dan mempertahankan keteraturan sosial dalam suatu kerangka tertentu melalui suatu praktek-praktek pengaturan berdasarkan kekuatan menekan melalui antara lain kekuatan fisik. Tetapi Lowie yang juga melihat praktek-praktek kekuasaan dan kekuatan sebagai suatu unit analisa dalam organisasi politik menandai bahwa pada masyarakat yang sederhana, suatu bentuk pemerintahan sudah ada walaupun unsur-unsur paksaan atau tekanan berdasarkan kekuatan belum kelihatan Fortes dan Pritchard menyatakan bahwa pada masyarakat primitif, pimpinan adalah penentu yang mengatur kekuatan. Akan tetapi dalam masyarakat yang demikian kekuatan bukan menjadi monopoli satu orang atau golongan tertentu.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, terlihat bahwa ada dua pandangan mengenai organisasi politik dalam masyarakat yang bersahaja. Pertama adalah tidak semua masyarakat bersahaja mempunyai organisasi politik. Kedua organisasi politik tidak harus didefinisikan sebagai suatu kekuatan menekan.

Tulisan ini adalah sebagian dari laporan penelitian tim antropologi mengenai aspek politik pada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Penekanan dari tulisan ini adalah sistem pemerintahan tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan unit analisisnya pada identitas kelompok politik dan hubungan kelompok-kelompok itu di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tulisan ini terbagi atas beberapa bab, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yakni, pertama deskripsi mengenai kelompok berdasarkan kekerabatan dan teritorial. Dalam deskripsi ini kami berusaha untuk menunjukkan bagaimana seseorang menjadi bagian dari kelompok teritorial, dan lain pihak orang itu menjadi bagian dari kelompok kekerabatan . Kedua adalah deskripsi mengenai hubungan-hubungan kekuatan diantara kelompok-kelompok yang ada yang dilandasi atas pranata-pranata yang berlaku pada masyarakat tersebut. Ketiga adalah sistem pemerintahan tradisional yang ditunjukkan melalui deskripsi mengenai kekuatan dan kekuasaan dalam sistem kekerabatan dan organisasi sosial, khususnya mengenai bagaimana seseorang atau kelompok menggalang kekuatan dan kekuasaan dalam rangka tujuan-tujuan politiknya.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun sasaran tulisan ini adalah masyarakat terasing di Nusa Tenggara Timur. Tulisan tentang masyarakat suku bangsa itu masih terbatas. Sejauh ini diketahui bahwa jumlah penduduk setiap masyarakat yang diteliti hanya mengumpulkan informasi yang di berikan oleh para penyiara agama katholik, petugas sosial yang kebetulan mendapat tugas di wilayah itu. Tegasnya baik pencatat statistik kecamatan maupun hasil survei untuk menentukan dengan pasti jumlah dan variasi penduduk di wilayah yang menjadi daerah penelitian.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih sistematis, peneliti mengembangkan pedoman wawancara dan pedoman pengamatan. Hal ini disamping untuk menguji ulang pernyataan anggota masyarakat juga memudahkan peneliti untuk secepatnya menulis hasil laporan.

Para peneliti juga mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mencatat semua data yang terdapat pada kantor pemerintah

daerah setempat, antara lain dengan mengambil data kependudukan, peta atau daerah lokasi.

Sejumlah alat rekam juga digunakan untuk mendukung tehnik penelitian di lapangan. Alat - alat tersebut antara tape recorder dan kamera, terutama di gunakan untuk mengikat peneliti mengenai suasana wawacara dan lokasi - lokasi penting di daerah penelitian. Dengan demikian kelengkapan dasar bagi penelitian ini di harapkan dapat membuat data yang di kumpulkan di lapangan lebih rinci dan lengkap.

Didasarkan suatu penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencoba mendiskripsikan aspek - aspek kehidupan yang menjadi fokus penelitian untuk mencapai penelitian tentang prinsip - prinsip umum yang dapat di gunakan untuk menjelaskan gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur, para peneliti tinggal di desa-desa tempat penelitian. Selama berada bersama penduduk setempat di lakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut.

BAB II

IDENTIFIKASI DAERAH NUSATENGARA TIMUR

2.1 Lokasi dan Lingkungan Alam

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terletak antara 8^0 - 12^0 Lintang Selatan dan 118^0 - 125^0 Bujur Timur. Propinsi ini disebut juga Flobamor, kepanjangan dari Flores, Sumba dan Timor yakni nama tiga buah pulau besar. Selain ketiga pulau itu masih banyak pulau-pulau yang tersebar di sekeliling pulau-pulau itu yang terlalu banyak untuk disebut satu per satu.

Secara administrasi propinsi Nusatenggara Timur berbatasan dengan laut Flores disebelah Utara, propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur di sebelah Timur, Samudra Indonesia di sebelah Selatan, dan Selat Sape di sebelah Barat. Selat Sape ini yang memisahkan Nusatenggara Barat dan Nusatenggara Timur.

Secara geologis pulau-pulau di Nusatenggara Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni (1) jalur dalam Flores, (2) jalur antara, dan (3) jalur luar. Pulau-pulau yang termasuk dalam jalur dalam antara lain pulau-pulau Flores, Komodo (Flores Barat). Adonora, Solor, dan Lomblen (Flores Timur). Pantan, Alor dan sebagian timor. Pulau Rinca yang menyerupai Flores darat terdiri atas masif gunung berapi yang andelis di bagian selatan, baluran *andesit* di timur laut dan di

bagian barat daya tersiri atas *tufmarine*. Pulau Komodo do bagian barat daya merupakan pegunungan sepanjang sekitar tiga puluh lima kilometer yang mengandung *andesit* dan *desit* disebelah timur serta utara merupakan Karang Koral. Dipulau Adonara ditemukan konglomerat *tufandesit* dan batu kapur karang. Gunung Boleng yang terletak di bagian tenggara pulau ini masih aktif dengan lafanya terdiri atas *bazalt* dan *andesit* serta sisa batuan vulkanis tua.

Selanjutnya, pulau Solor terdapat empat gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Gunung-gunung ini memisahkan dataran yang terdiri atas batu karang koral dan aluvial. Sementara itu batu lelehannya terdiri atas *andesit* dan *bazalt*. Kemudian di bagian tengah pulau Lomblen terdapat pegunungan vulkanis tua. Selain itu di pulau ini juga terdapat lima gunugn berapi yakni Lewa Tolo, Werang (masih aktif), Kendang, Mingar, dan Labalekang (tidak aktif). Batuan lelehannya yang diselingi *tuff*, batu kapur dan napal. Alor barat daya dipisahkan oleh patahan arah utara-selatan sehingga merupakan depresi dimulai dari kikirai hingga Buraga. Pulau pantar bagiaan barat terdapat vulkanis yang masih aktif dengan tujuh sumber erupsi. Hasil dari erupsi ini berupa *bazalt* dan *andesit*.

Zone jalur antara hanya terdiri satu yaitu Sumba. Pulau ini sebagai ini sebagai penghubung geologis antara zone jalur luar yang nonvulkanis. Sementara itu jalur luar merupakan daerah depresi yang terletak dari teluk Kupang hingga perbatasan Timor Timur dan berakhir di sungai Lois.

Wilayah Nusatenggara Timur ini umumnya dipengaruhi dua perubahan arah angin setiap tahunnya. Masing-masing arah angin ini dari tenggara dan barat laut. Sebagaimana halnya di tempat lain di Indonesia, Nusatenggara Timur mempunyai iklim yang disebut tropik. Menurut perkiraan musim kemarau berlangsung April sampai dengan September dan musim penghujan berlangsung mulai Oktober sampai dengan Maret. Namun demikian dalam kenyataannya sering terjadi pergeseran baik awal dan akhir atau lamanya musim berlangsung. Yang terjadi di Nusatenggara Timur musim kemarau berlangsung lebih panjang yakni mulai Maret sampai dengan November.

Raut bumi Nusatenggara Timur berbeda dengan pulau-pulau lain

di Indonesia. Hampir 70% daerahnya terdiri atas dataran tinggi, berbukit, bergunung dengan bervariasi sudut kemiringan lerengnya. Sementara itu dataran rendah sangat terbatas dan sempit-sempit. Propinsi ini terdiri atas seratus pulau besar dan kecil. Seperti telah disebutkan di depan, bahwa di propinsi ini terdapat tiga puluh besar yakni Timor, Sumba, dan Flores. Sebagai gambaran umum, ketiga pulau ini yang akan dibahas.

Pulau Timur termasuk jalur luar. Di pulau Timur inilah terdapat dua barisan pegunungan. Barisan pegunungan Utara mulai pantai barat memanjang pada bagian Utara sampai ke propinsi Timor Timur. Sementara itu barisan pegunungan Selatan tidak sepanjang pegunungan Utara. Pegunungan ini berawal dari pertengahan kabupaten Timor Timur Selatan bagian selatan dan masih punya cabang tetapi pendek-pendek.

Kabupaten yang bergunung-gunung atau raut muka bumi cukup berat ialah Kabupaten Timor-Timur selatan. Bagian utaranya mempunyai ketinggian antara 1500 sampai dengan 2000 meter dari permukaan laut. Demikian pula dibagian selatan dengan ketinggian sekitar 1000 meter. Ada beberapa puncak gunung yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, sebagai berikut :

Beberapa puncak (> 1000 m) di pulau Timor Tengah Utara

Pegunungan	Puncak	Tinggi (meter)	Kabupaten
Utara	Fatu Leu	1.115	Kupang
	Tubu Humau	1.295	Kupang
	Fatu Metan	1.111	Kupang
	Fatu Timau	1.774	Kupang
	Fatu Menan	1.149	Kupang
	Netu Liu	1.170	Kupang
	Netu Bijae	1.569	Kupang
	sunan		
	Netu Nefom	2.251	Kupang
	nasi		
	Tubu Mulis	2.365	TTS
	Tubu Kekne	2.070	TTS
	Tubu Nunbena	1.259	TTS
	Tubu Mollo	1.635	TTS
	Tubu Ajaopem	1.550	TTS

Sumber : Geografi Budaya Daerah Nusatenggara Timur 1977/78

Beberapa pulau yang termasuk kelompok kepulauan Timor adalah Sabu atau Sawu, Raijua dan Rote. Pulau Sabu terbentuk dari karang koral yang terangkat sampai 300 meter dari permukaan laut. Bantuan dasar dibagian tengah banyak mengalami lipatan. Pulau Raijua terdiri atas batu karang koral, napal putih dan batu kapur serta napal kapur. Pulau Rote merupakan kristalin *schist*. Umumnya pulau Rote terdiri atas kerak sedimen yang mengalami pelipatan.

Umumnya dataran rendah di pulau Timor terdapat di bagian luar pulau seperti di muara sungai dekat pantai.

Beberapa dataran rendah di pulau Timor antara lain sebagai berikut :

No.	Dataran rendah	Luas (ha)	Kabupaten
1.	Besikama	25.000	Belu
2.	Bena	18.000	Timtim Selatan
3.	Desao Pariti	10.000	Kupang
4.	Aroki	6.000	TTU / Belu
5.	Mena	5.000	TTU
6.	Bikomi	5.000	TTU
7.	Lidak	3.000	Belu
8.	Ponu	3.000	TTU
9.	Bokos	2.000	Kupang
10.	Mumusa	1.000	Belu

Sumber : Geografi Budaya Daerah Nusa Tenggara Timur, 1977/78

Pulau Sumba terletak diantara jalur dalam dan jalur luar. Raut muka bumi pulau Sumba dapat di kelompokkan menjadi empat bagian yakni: (1) teras-teras laut yang tinggi, (2) dataran tinggi, (3) daerah pegunungan, dan (4) dataran rendah.

Daerah teras terdapat di sepanjang pantai barat utara dan timur dengan ketinggian rata-rata 600 meter dari permukaan air laut. Sungai-sungai yang berhulu di pedalaman membentuk palung-palung yang dalam dan sempit. Terras-teras ini pada palung yang dalam dan sempit, lebarnya rata-rata 10 meter, sedangkan pada tempat-tempat yang tidak dalam lebarnya dapat mencapai 28 kilometer sementara iru di bagian selatan dapat di jumpai sisa-sisa terras di beberapa tempat. Antara Memboro dan Waingapu terras-teras pantai terdiri atas batu-batu kering dengan vegetasi rumput dan semak-semak. Di belakang terras-terraske arah pedalaman merupakan perbukitaan, lembah dan bentuk "V". Umumnya dasar lembah berada antara 200 sampai dengan 300 meter dibawah puncak jalur-jalur tersebut.

Dataran tinggi dipulau Sumba terputus-putus dan berupa lapisan atau kapur. Di bagian tengah Sumba Barat terdapat tiga dataran yang cukup luas. Meskipun demikian dataran ini agak bergelombang dan berada pada ketinggian antara 400 sampai dengan 500 meter di atas

permukaan air laut. Dataran-dataran ini dikelilingi perbukitan yang merupakan ongkongan tanah. Ketiga dataran ini adalah Waikabubak, Makawang dan Lewa.

Daerah pegunungan yang sangat kasar topografinya merupakan hulu sungai-sungai yang bermuara kepantai-pantai selatan. Ada beberapa puncak di daerah pegunungan ini adalah sebagai berikut :

Beberapa puncak di pulau Sumba

No.	Nama Gunung	Tinggi (m)	Kabupaten
1.	Wanggameti	1.255	Sumba Timur
2.	Barakaka	1175	Sumba Timur
3.	Ananjahi	1172	Sumba Timur
4.	Anggika	1150	Sumba Timur
5.	Tabau	1100	Sumba Timur
6.	Iwing	1085	Sumba Timur
7.	Wairume	1072	Sumba Timur
8.	Pakubandil	1050	Sumba Timur
9.	Kapunduk	1050	Sumba Timur
10.	Panetang	1000	Sumba Timur
11.	Tanadaro	900	Sumba Timur
12.	Jawila	887	Sumba Timur
13.	Pernubu	830	Sumba Timur

Sumber : Geografi Budaya Nusantara Timur. 1977/78

Dataran yang ada di pulau sumba antara lain Rambangaru , Rawangu , Tanah Langu , Ngallu , Baiang , dan Ngongi di kabupaten Sumba Timur. Sementara itu di kabupaten Sumba Barat adalah Gawa, Kodi laura dan Wanukaka. Secara umum dapat di katakan bahwa dataran yang cukup berarti dan potensial hanya terdapat di beberapa tempat saja , sedangkan selebihnya berupa gunung atau pegunungan dan perbukitan.

Pulau besar ketiga adalah Flores termasuk Alor Pantar. Kepulauan ini merupakan lanjutan sistem pegunungan Sunda atau disebut jalur dalam. Dipulau ini terdiri atas banyak gunung atau pegunungan. Daerah pegunungan di Flores, Alor dan Pantar meliputi antara 70% sampai dengan 80% dari seluruh dataran. Arah barisan gunung ini kebanyakan membujur sepanjang pulau. Selebihnya adalah yang melintang arah utara ke selatan. sementara itu daratan yang tidak begitu luas terdapat di pantai - pantai.

Pulau flores mempunyai panjang 336 kilometer dengan lebar 60 kilometer yang terdapat di kabupaten manggarai . kabupaten-kabupaten lainnya di pulau flores umumnya kurang dari 60 kilometer lebarnya. Mulai dari barat hingga bagian tengah terdapat gunung-gunung yang tingginya mencapai lebih dari 1000 meter. gunung-gunung itu antara lain Dedeng (1.362 m) yang letaknya di bagian barat daya Manggarai. Rajong (1490) di bagian selatan Manggarai, Curung Munbeng (1750 m), Rato (1800 m) dan Nao (2007). Nao merupakan puncak dari pegunungan Todo.

DI Ruteng, ibukota kabupaten Manggarai, terdapat pegunungan Ruteng yang tertinggi di pulau Flores , bahkan di Nusa Tenggara Timur. Di pegunungan ini terdapat dua puncak yang tingginya lebih dari 2000 meter, yakni, Mandasawa dan Ranalah.

Kabupaten Ngada bagian selatan terdapat pula dua puncak yang tingginya lebih dari 2000 meter. Kemudian di daerah perbatasan antara Ngada dan Manggarai terdapat pegunungan Raja. Bagian tengah kabupaten Ngada permukaan tanahnya berbukit - bukit sampai bergunung - gunung dengan dataran tingginya yang umumnya membujur dari barat ke timur sampai lembah Ngaboa. Sementara itu di bagian utara Ngada terdapat dataran rendah merupakan padang - padang yang luas, yakni dataran rendah Mbay dan Soa.

Pulau Adonara yang panjangnya 32 kilometer dan lebarnya 18 kilometer terdapat gunung I Boleng (1.659 m) merupakan puncak tertinggi di pulau ini. Pulau Lembata (lomblen) dengan panjang 48 kilometer dan lebar 28 kilometer terdapat gunung Labolebang (1.664 m), gunung Lowoloto (1.540 m), dan gunung Nyolewong (1.553 m).

Relief yang terdapat di pulau Alor lebih tajam perbedaannya.

Pulau - pulau ini berteras - berteras sampai ratusan meter. Pulau ini mempunyai panjang 90 kilometer dengan lebar 35 kilometer terdapat pegunungan membujur arah barat - timur dengan puncak-puncaknya antara lain Potomana (1.765 m), Muna (1.423 m), Openmama (1.378 m), Laling (1.225 m). Dataran rendah yang sempit di pulau ini antara Lamtoka (2.000 Ha), Kokar dan Benlelang.

Secara umum dapat di gambarkan bahwa wilayah Nusatenggara Timur sebesar 70% mempunyai kemiringan lereng kurang 40% , sedangkan yang 30% kemiringan lerengnya lebih 40% dari luas seluruh dataran. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kabupaten	Luas (Ha)	% Kemiringan		Keterangan
		<40%	>40%	
Kupang	783110	52	48	tidak ada
Sumba Timur	771000	77	23	
Manggarai	710600	-	-	
Sumba Barat	458700	93	7	
TTS	433000	69	31	idem
Flores Timur	312300	-	-	
TTU	304400	75	25	
Alor	291600	48	52	
Ngada	276500	-	-	idem
Ende	243600	-	-	idem
Belu	236100	89	11	idem
Sikka	166800	-	-	

2.2 Kehidupan Ekonomi

Usaha pertanian di Nusatenggara Timur sangat menonjol karena beberapa faktor seperti keadaan alam (iklim), tingkat pengetahuan petani, adat istiadat dan keadaan penduduk yang cenderung ke usaha berladang dan berkebun. Bersawah hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu oleh sejumlah penduduk yang tidak terlalu besar.

Tanaman usaha utama penduduk Nusatenggara Timur adalah jagung, kemudian padi. Tanaman padi ini sedang diusahakan atau ditingkatkan baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi.

Makanan utama penduduk Nusatenggara Timur adalah jagung. Sementara itu padi hanya di simpan yang sewaktu-waktu digunakan untuk keperluan pesta adat, kematian, perkawinan atau untuk di suguhkan pada tamu-tamu yang dihormati. Selain jagung, umbi-umbian juga dikonsumsi sebagai makanan tambahan atau selingan baik pada waktu pagi hari maupun sore hari. Selanjutnya, kacang-kacangan digunakan sebagai campuran jagung atau beras atau dijadikan lauk sebagai pengganti daging, ikan atau sayur-sayuran. Sementara penduduk mengkonsumsi kacang-kacangan pada waktu tertentu menjadi makanan pokok.

Dalam hal usaha perkebunan, belum banyak pengusaha swasta yang tertarik untuk mengusahakannya. Usaha pekerbunan biasanya diusahakan penduduk secara sederhana. Hasilnya biasanya juga dikonsumsi sendiri, kemudian kalau ada kelebihan baru dijual. Beberapa tanaman perkebunan yang diusahakan antara lain ketumbar, bawang putih, kopi, apel kelapa, dan kapuk. Kelapa banyak tumbuh dikabupaten-kabupaten Flores Timur, Sikka, Belu, Ende, Sumba Timur, Ngada, dan pulau Rote. Kelapa ini oleh penduduk biasanya dibuat kopra dan di olah lagi menjadi minyak kelapa. Oleh karena hasilnya yang cukup banyak, kopra ekspor ketempat lain sedangkan minyak kelapa di konsumsi sendiri.

Perkebunan kopi yang diusahakan penduduk terdapat di beberapa kabupaten terutama di Flores Timur. Penghasil kopi lainnya adalah kabupaten Ngada, Manggarai dan daerah pebunungan Timor-Timur Selatan dan Timor-Timur Utara.

Penghasil ketumbar paling banyak berada di kabupaten Timor-Timur Selatan. Setiap tahun kabupaten ini menghasilkan puluhan dan ratusan ton. Namun demikian angka-angka yang pasti mengenai produksi ini sulit di peroleh. Ketumbar kebanyakan diusahakan oleh rakyat di kecamatan Mollo Utara dan Miomafo Barat. Selanjutnya apel merupakan tanaman yang belum diusahakan di Nusatenggara Timur. Apel ini banyak diusahakan di kecamatan Mollo Utara. Sementara itu kapuk belum diusahakan secara intensif. Kebanyakan penduduk menanam kapuk sebagai par pekarangan. Hasilnya belum seberapa dan hanya cukup untuk keperluan sendiri.

Selain mengusahakan tanaman, Penduduk Nusatenggara Timur juga mengusahakan atau memelihara hewan baik hewan besar, hewan kecil maupun unggas. Hewan besar yang dipelihara adalah sapi bali, sapi ongalo, dan sapi madura. Kemudian yang termasuk hewan kecil adalah kambing, domba, dan babi. Sementara itu unggas terdiri atas itik dan ayam.

Sapi bali yang dipelihara terdapat di pulau Timor. Sapi ongale di pulau Sumba dan sapi madura di pulau Flores. Cara memeliharanya masih tradisional yaitu dibiarkan di alam bebas dan hanya sewaktu-waktu dikandangan. Oleh karenanya sapi, kuda dan kerbau ini hidup liar sehingga perkembangannya sulit didata secara pasti. Demikian pula mutu dagingnya juga kurang baik. Melihat kenyataan ini, kemudian timbul ide baru berkaitan dengan peternakan ini. Mulailah dikembangkan sistem pemeliharaan sapi yang disebut paron. Dengan sistem ini mutu sapi dapat ditingkatkan dan pada gilirannya produksinya lebih baik. Untuk menggairahkan sistem ini, setiap tahun diadakan kontes sapi paron.

Ternak lain yakni kerbau kurang berkembang di Nusatenggara Timur. Iklim yang panas kurang cocok bagi berkembang biak kerbau. Dengan demikian populasi ternak kerbau tidak berkembang sebagai mana mestinya.

Hewan kecil seperti kambing, domba, dan babi serta sejenis unggas dipelihara penduduk untuk keperluan sendiri seperti daging dan telur.

Perikanan di Nusatenggara Timur yang diusahakan adalah

perikanan darat dan laut. Laut yang termasuk wilayah Nusatenggara Timur cukup kaya ikan. Potensi perairan (laut dan darat) cukup besar dan belum dioalah sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi hal ini pemerintah memberikan kredit kepada para nelayan guna memodernisasi alat penangkap ikan yang motorisasi . Perairan yang potensial adalah Flores bagian Timur dan Alor. Daerah ini selain untuk penangkapan ikan biasa, juga sebagai pusat penangkapan ikan paus. Penduduk di daerah ini ahli dalam menangkap ikan paus. setiap tahun berpuluh-puluh ikanpaus berhasil di tangkap penduduk.

Selain perikanan laut, perikanan darat belum banyak mendapat perhatian penduduk. Hal ini karena penduduk pedalaman lebih suka mengkonsumsi daging dari pada ikan sehingga perikanan darat tidak banyak berkembang. Perikanan darat dan air payau masih merupakan contoh percobaan untuk menarik minat penduduk.

Sebagaimana telah diketahui Nusatenggara Timur terdiri atas banyak pulau. Oleh karenanya didaerah ini hanya pelabuhan sebagai prasarana perhubungan atau transportasi. Pelabuhan-pelabuhan itu tersebar hampir seluruh kabupaten. Pelabuhan yang ada di kupang adalah Kupang, Baa, Seba, dan Teno. Pelabuhan di Belu adalah Hapupu. Pelabuhan di Alor adalah Kalabahi. Pelabuhan di Flores adalah Laantuka dasn Wai Werang. Pelabuhan di Sikka adalah Maumere. Pelabuhan di Ende adalah Ipi. Pelabuhan di Ngada adlah Timere dan Maubawa. Pelabuhan di Manggarai adalah Reo, Mborong dan Pelabuhan Bajo. Pelabuhan di Sumba Barat adalah Waiketo serta Pelabuhan di Sumba Timur adalah Waingapu.

Kecuali pelabuhan Teno di Kupang, ibu kota propinsi hampir semua pelabuhan tidak dapat disandari kapal untuk bongkar muat. Pelabuhan bongkar muat yang ada fasilitas pergudangan hanya ada di beberapa pelabuhan saja, seperti Tano, Ende, Waingapu, Maumere, Kalabahi, Karantuka. Sementara itu pelabuhan laut untuk perahu-perahu layar tersebar di seluruh pelabuhan pantai yang ada perkampungannya terutama kampung nelayan.

Jalan- jalan di Nusatenggara Timur umumnya sudah dapat di lalui kendaraan bermotor seperti sepeda motor, jenis jeep, pick-ap, truk dan bis. Kendaraan-kendaraan ini melintasi di jalan-jalan sepanjang

5300 kilometer. Kondisi jalan yang ada berupa jalan aspal dan kerikil serta tanah, baik yang di miliki pemerintah pusat , propinsi dan kabupaten.

Jaringan udara di Nusatenggara Timur di selenggarakan oleh beberapa perusahaan penerbangan baik pemerintah maupun swasta. Demikian pula jangkauannya baik yang bersifat regional maupun lokal. Penerbangan regional dilakukan oleh Garuda Indonesia Airways enam kali seminggu dengan rute Kupang-Denpasar-Jakarta pergi / pulang dan Kupang-Maumere-Ujung pandang pergi / pulang. Penerbangan lokal merupakan penerbangan perintis yang dilayani oleh Merpati Nusantara Airline (MNA), Dirgantara Air Service (DAS) dan milik misionaris dan zending.

2.3. Kehidupan Sosial Budaya

Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibukota Kupang terdiri atas 12 kabupaten dan satu kodya mencakup 166 kecamatan. Di wilayah ini berdiam berbagai sukubangsa-sukubangsa yang ada di Nusatenggara Timur yaitu Sumba, Sabu, Rote, Helong, Dawan, Tetum, Melus, Buna, Kemak, Alor, Lamaholot, Kedang, Lio, Krowe, Sikka, Ende, Bajawa, Noge, Rung dan Manggarai.

Sukubangsa Dawan merupakan penduduk asli yang mendiami sebagian kecamatan di kabupaten Kupang kemudian di seluruh kabupaten Timor Tengah selatan dan kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Sumba Barat dan kabupaten Sumba Timur seluruhnya di diami sukubangsa Sumba. Sukubangsa lamaholot tinggal di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Flores timur. Sukubangsa manggarai terbesar di seluruh kabupaten manggarai. Sukubangsa Ende menghui di sebagian kecamatan yang adi di kabupaten Ende.

Struktur kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur berdasarkan sistem genealogis teritorial. Dengan demikian kehidupannya yang bulat baik dalam penyelenggaraan hidup sosial maupun dalam batas wilayahnya. Dalam masing-masing wilayahnya terdapat lembaga-lembaga adat yang mengatur segala aspek kehidupan baik kehidupan rohani maupun jasmani.

Bentuk kesatuan di Nusatenggara Timur berupa desa atau kampung yang masing-masing daerah berbeda menurut tradisi dan

bahasanya. Beberapa daerah ini antara lain sebagai berikut. Di Dawan disebut desa (gabungan dari Kuan atau Lapo). Di Sabu disebut Udu. Di Manggarai disebut Beo di Helong disebut Ingu di Sumba disebut Peraingu dan di Ngada disebut Ulu Eko.

Ada wilayah tentu ada pemimpinnya. Pimpinan dalam masing-masing wilayah adalah ketua adat sebagai pengusaha tertinggi. Jabatan ini sebagai warisan atau berdasarkan pada keturunan. Pimpinan ini harus laki-laki tertua dari garis keturunan Bapak dari klan pertama. Dalam menjalankan kekuasaannya, pimpinan ini dibantu tua-tua adat. Sebutan pimpinan di masing-masing daerah berbeda seperti di Dawan disebut Lemukung, selanjutnya di Sabu disebut Udu, di Manggarai Tua Teno, di Helong Kaka Ama, di Ngada Mosa One Mia, dan di Sumba Kabihu.

Hubungan sosial yang terjadi berdasarkan pada kekeluargaan atau gotong royong. Kerjasama atas dasar kekeluargaan diwujudkan baik dalam penyelenggaraan hidup spriritual seperti berbagai macam upacara yang banyak makan biaya, maupun penyelenggaraan hidup sehari-hari seperti mengerjakan ladang, berburu atau membangun rumah.

Kerjasama ini silih berganti dan bisa terjadi pada setiap warga masyarakat. Misalnya seseorang yang memberi bantuan berupa dana atau tenaga baik diminta atau suka rela, bila saatnya ia punya hajat maka warga lainnya akan membantu. Hubungan sosial semacam ini merupakan hal yang tak bisa dihindari setiap warga masyarakat.

Untuk semakin mempererat ikatan masyarakat, biasanya dibentuk perkumpulan. Perkumpulan adat di Nusatenggara Timur umumnya berdasarkan pada kekeluargaan atau kepercayaan. Hal ini sesuai dengan struktur masnyarakat yang berbentuk genealogis. Perkumpulan juga sebagai sarana pendukung tau pemeliharaan adat. Dengan adanya perkumpulan ini ikatan masyarakat tetap terkendali karena adanya saling pengertian antara yang memimpin dan yang dipimpin. Pimpinan dalam perkumpulan ini biasanya diambil orang tua yang berwibawa dan mampu untuk memimpin di lingkungan masyarakatnya. Di Sabu ada perkumpulan yang di sebut Ada. Azas dari perkumpulam ini adalah kekerabatan. Perkumpulan ini anggotanya orang-orang dari wilayah Udu dan Kerogo. Kegiatan perkumpulan antara lain mengadakan

pertunjukan perang daalm upacara adat. Faedah yang dirasakan masyarakat dengan adanya perkumpulan adalah menanamkan jiwa kepahlawanan, menanamkan rasa persatuan dan mempercepat perkumpulan adat. Perkumpulan ini merupakan pengaruh positif terhadap masyarakat. Wujud dari hal ini adanya penghargaan masyarakat pada pimpinannya sebaliknya masyarakat taat melakukan adat istiadat.

Sebagaimana struktur masyarakat stratifikasi masyarakat juga berdasarkan sistem kemurnian dari kelompok keturunan pemuka suatu daerah yang pertama atau pendiri kerajaan di daerah ini. Tingkatan sosial ditentukan jauh dekatnya hubungan darah dengan cikal bakal orang yang membuka daerah itu. Kelompok orang yang terdekat dengan cikal bakal merupakan lapisan tertinggi. Sementara itu kelompok yang terjauh hubungannya merupakan lapisan yang lebih rendah di tingkatan sosial.

Hampir di setiap daerah di Nusatenggara Timur mempunyai mitos tentang manusia pertama sebagai cikal bakal. Urutan genealogis dan manusia hingga keturunannya ke bawah sekarang merupakan struktur sosial masyarakat adat. Orang-orang yang terdekat hubungan darah dengan manusia pertama seperti raja, kaum bangsawan atau kepala adat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan keturunan yang masih hidup.

Di Nusa Tenggara Timur, lapisan sosial masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu lapisan banepawan, lapisan rakyat biasa dan lapisan budak. Lapisan banepawan adalah kelompok masyarakat keturunan langsung atua terdekat dengan cikal bakal. Kemudian lapisan dibagi pula berdasarkan jauh dekatnya nenek moyang yang menurunkan mereka. Dalam pemerintahan lapisan ini meruakan kelompok yang memegang kekuasaan. Di Ende, lapisan itudisebut Ata Ng gae (yang dipertuan).

Lapisan rakyat biasa adalah kelompok yang maish ada hubungan darah dengan cikal bakal tetapi hubungan itu sudah jauh. Kelompok ini tidak memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Lapisan paling bawah adalah budak. Lapisan ini merupakan orang-orang bekas tawanan perang atau orang-orangyang tidak dapat membayar hutang. Selain itu juga termasuk orang-orang yang jatuh miskin yang kemudian menghambakan diri pada orang lain.

BAB III

KONDISI MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN PENDUDUK DI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1 Pengantar

Sesungguhnya, propinsi Nusatenggara Timur dilintasi oleh transportasi darat, udara dan laut, sehingga secara geografis wilayah itu tidak betul-betul berasing dari propinsi-propinsi lain di Indonesia. Namun demikian intensitas transportasi dan komunikasinya, khususnya antar daera hdi kawasan Nusatenggara Timur masih sangat terbatas, sehingga kontak antara penduduk satu daerah dengan daerah yang lainnya terasa sangat jarang. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi maupun komunikasi telah membatasi arus gerak penduduknya untuk menjangkau daerah yang lebih jauh lagi. Hal ini membawa dampak pemahaman masyarakat setempat terhadap pendatang menjadi terbatas. Pergaulan antara penduduk hanya terbatas dikalangan masyarakat sekitarnya.

Hutan sudah tidak banyak terdapat di wilayah ini. Ada sementara orang melihat keterkaitan antara kurangnya hutan dan ketidak subur tanah. Akan tetapi pembabatan hutan yang tak terkendali juga menjadi faktor pendorong semakin menipisnya persediaan hutan di wilayah ini. Beberapa kasus telah menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan

penebangan hutan yang tidak terdaftar telah melakukan penebangan tanpa dapat dicegah oleh aparat pemerintah daerah. Di samping itu menipisnya lahan hutan juga disebabkan keterlibatan penduduk setempat melakukan penebangan secara liar. Keterlibatan penduduk itu tidak dapat dipersalahkan mengingat kebutuhan hidup mereka semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya hasil-hasil produksi mereka. Keterlibatan penduduk di Nusatenggara Timur dalam ekonomi pasar, menurut beberapa pendapat merupakan faktor pendukung ketidak perdulian mereka akan lingkungannya sendiri. Oleh karena itu proses sebab akibat yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak dapat dengan sederhana disimpulkan. Dalam kasus menipisnya persediaan hutan tidak saja perusahaan HPH atau non HPH yang dapat dipersalahkan. Akan tetapi bekerjanya suatu sistem keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan.

Seperti halnya daerah-daerah di Propinsi Nusatenggara Timur lainnya yang memiliki kondisi geografis relatif kering, maka dataran tinggi di wilayah ini diselingi oleh padang rumput yang sekali-sekali tumbuh seonggok semak dan pepohonan. Akibat musim kemarau yang panjang serta keterbatasan penampungan persediaan air, maka sistem bercocok tanam yang paling tepat adalah menanam palawija (singkong, ubi, kacang-kacangan) di samping cocok untuk tempat menggembala ternak. Namun akhir-akhir ini hasil cocok tanam penduduk tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi untuk meningkatkan pendapatan penduduk, diperlukan tenaga-tenaga trampil yang jarang terdapat di kalangan penduduk. Sekarang ini penduduk yang tidak lagi semata-mata mengandalkan mata pencaharian sebagai petani, peladang atau penggembala.

3.2 Pola Perkampungan

Perkampungan di Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya paralel dengan jalan-jalan utama. Biasanya jalan utama yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan antara satu kota kecamatan dengan kota kecamatan lainnya atau antara satu dengan desa lainnya. Rumah-rumah penduduknya kira-kira satu sampai dua meter dari jalan utama

itu, berderet-deret di sepanjang jalan utama itu sampai berakhir pada batas tertentu, biasanya merupakan huma atau tanah kosong. Kemudian mulai lagi dengan perkampungan berikutnya. Perkampungan itu tidak dibentuk secara tradisional atau dengan kata lain masuknya unsur baru telah menyebabkan pola perkampungannya terbentuk seperti sekarang ini. Hal ini dapat dibandingkan dimana pola perkampungan pada jaman dahulu umumnya membentuk lingkaran dengan rumah adat berada di tengah-tengah rumah keluarga. Biasanya pola perkampungan jaman dahulu lebih memfokus pada rumah adat, sehingga semua prasarana maupun sarana lebih mengutamakan rumah adat. Dengan demikian rumah adat menjadi pusat perhatian bagi penduduknya. Oleh karena itu, biasanya di depan rumah adat merupakan tanah lapang dengan pohon-pohon yang rindang dikiri kanannya.

Di lain pihak pola perkampungan sekarang lebih mengutamakan rumah keluarga, sehingga pusat perhatian menjadi lebih sempit lagi. Oleh karena itu tidak penting bagi penduduk untuk mendukung sarana dan prasarana rumah adat, melainkan rumah keluarga. Karena itu dengan tersedianya jalan-jalan khususnya jalan utama pendidik, saling berlomba untuk membuat rumahnya ditepi jalan itu.

Fasilitas di kecamatan itu umumnya seragam dengan fasilitas di kecamatan lainnya. Ini merupakan konsekuensi dari pembangunan nasional yang menyeluruh. Di setiap ibukota kecamatan, seperti di pusat-pusat desa biasanya ada lapangan yang berfungsi sebagai tempat berbagai kegiatan desa maupun kecamatan mulai dari kegiatan keagamaan sampai dengan kegiatan pemerintahan. Di sekitar lapangan itu biasanya terdapat bangunan kantor-kantor pemerintah, antara lain kantor Kecamatan, Kantor Desa, Puskesmas, Koramil, Polsek dan beberapa lembaga pemerintah ditingkat Kecamatan atau Kabupaten lainnya.

Ada beberapa bangunan permanen yang merupakan kantor-kantor instansi pemerintah di tingkat kecamatan. Beberapa kantor itu masih dalam taraf perbaikan karena jarang digunakan. Di samping itu ada beberapa gedung yang digunakan untuk berbagai tujuan.

Rumah tempat tinggal penduduk umumnya berbentuk panggung dengan corak tradisional setempat. Bahan bangunannya dari kayu dan atapnya rumbia. Hanya beberapa rumah berbentuk arsitektur moderen, terutama penghuninya adalah pendatang.

3.3 Sistem Kekerabatan

Suatu keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah hidup dalam rumah tangga sendiri. Keluarga batih ini adalah kesatuan hidup ekonomi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam keluarga batih ini timbul hak dan kewajiban bagi bapak, ibu dan anak-anak. Bapak adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah hidup. Ibu adalah pembantu suami yang turut membina kehidupan rumah tangga dan memelihara segala harta yang diperoleh suami. Anak-anak adalah tenaga yang diharapkan untuk turut memperkuat ekonomi rumah tangga bila mereka telah sanggup untuk bekerja. Karena itu dalam suatu keluarga batih terjalinlah suatu hubungan yang mesra antara bapak, ibu dan anak-anaknya.

Keluarga luas diklasifikasikan sebagai suatu kelompok yang berasal dari satu keturunan sampai tingkat tiga. Dalam keluarga luas ini selalu ada yang dianggap tertua sebagai tempat perlindungan bila terjadi pertikaian/perselisihan di antara anggota kelompoknya. Orang tua ini tidak saja dilihat dari segi usianya, tetapi terutama jabatna/ kedudukannya dalam masyarakat. Dalam menentukan waktu yang baik untuk pesta perkawinan, pengkhitanan, dan lain sebagainya, maka orang tua inilah yang dimintai pendapatnya.

Dalam pergaulan kekerabatan ada berbagai norma dan nilai yang harus ditaati. Pedoman norma dan nilai itu mengacu pada dua hal, yakni berdasarkan hubungan sungkan (*avoidance relationship*) dan hubungan mesra (*joking relationship*). Dalam masyarakat Nusatenggara Timur yang patrilineal, hubungan-hubungan terjalin berdasarkan ikatan atas keturunan laki-laki. Hal ini membawa konsekwensi akan adanya pembagian kelompok dalam masyarakat itu. Anggota kerabat adalah orang-orang yang berasal dari satu keturunan berdasarkan garis laki-laki. Diluar garis laki-laki dianggap bukan anggota kerabat. Namun demikian bukan berarti orang-orang yang berada diluar anggota keturunan laki-laki tidak mempunyai peran dalam mengatur hubungan sosial atau adat sehari-hari dalam mengatur pergaulan. Pada masyarakat yang bertipe unilineal baik patrilineal maupun matrilineal, maka hubungan periparan sangat penting artinya. Pada perempuan saudara laki-laki ibu adalah "jodoh ideal ego". Oleh karena itu peran amat

penting artinya dalam pergaulan kekerabatan. Hubungan antara anak Ego dengan saudara laki-laki ibu adalah hubungan sungkan. Sementara itu hubungan antar Ego dengan saudara laki-laki ibu adalah mesra. Karena banyaknya kasus-kasus yang menunjukkan hubungan mesra dan sungkan itu, maka ada teori yang menyebutkan kalau hubungan antar anak dan saudara ibu itu sungkan, maka hubungan anak dengan saudara ibu akan mesra, demikian pula sebaliknya.

Sesungguhnya terbatasnya data mengenai masyarakat dan kebudayaan penduduk di propinsi Nusatenggara Timur menyulitkan untuk pengkajian secara lebih mendalam mengenai kekerabatannya. Dalam buku-buku yang telah diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa pergaulan antar kerabat dapat diklasifikasikan dalam dua katagori. Pertama adalah hubungan pergaulan sehari-hari yang dianggap mesra atau intim. Kedua hubungan pada waktu formal, seperti ketika upacara adat dimana pada waktu itu hubungan saling menghormati. Lebih lanjut uraian itu menjelaskan mengenai pergaulan antar kerabat yang sebagian dinilainya seimbang, artinya hubungan antar Ego dengan kerabat dari pihak anak maupun ibu adalah mesra atau intim. Sebagian lainnya mempunyai ciri unilineal. Akan tetapi pada prinsipnya, seorang anak adalah anggota kerabat ayah maupun ibu. Seorang merasa sungkan terhadap mertuanya serta sapaan atau kerabat harus menggunakan istilah kerabatnya. Sapaan lama dianggap tidak sopan.

Kalau dilihat dari istilah-istilah kekerabatan yang berlaku pada masyarakat dan kebudayaan penduduk Nusatenggara Timur terlihat bahwa prinsip kekerabatan mereka pada umumnya bilateral, dimana kelompok kekerabatan yang terpenting adalah keluarga batih. Perluasan dari kelompok keluarga batih menjadi keluarga luas tidak diatur oleh norma dan nilai yang ketat.

Keluarga batih adalah unit produksi penting dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu aturan, norma dan nilai yang mengacu pada pewarisan hak dari nenek moyang tidak ada. Pemupukan harta dilakukan oleh keluarga inti, dan pembagiannya diatur berdasarkan jumlah anak-anaknya, sebaliknya tidak ada kewajiban dari anggota kerabat untuk memberikan harta warisannya kepada keluarga lain dalam satu garis

keturunan. Untuk menentukan prinsip kekerabatan suatu masyarakat juga dapat dilihat dari sistem perkawinannya.

Perkawinan adalah keturunan. Di samping itu perkawinan juga berkaitan dengan status sosial seseorang baik dari lingkungan keluarga itu sendiri, maupun di masyarakat. Pada beberapa masyarakat perkawinan di nilai amat penting artinya tidak saja sebagai suatu cara untuk melanjutkan keturunan, tetapi berfungsi sosial. Dalam literatur ilmu sosial, perkawinan merupakan tahapan hidup seseorang untuk menandakan adanya perubahan status, karena dalam perubahan status itu setiap orang akan mengalami suatu krisis, maka dalam setiap adanya perubahan itu diperlukan suatu upacara untuk menyelamatkannya dari segala bahaya hidup. Lebih penting dari itu, upacara diperlukan untuk mengabsahkan status barunya. Dengan adanya status baru sebagai orang yang sudah menikah/kawin, maka ia dianggap sebagai orang tua, walaupun usianya masih muda. Ini penting artinya dalam pergaulan sosial, khususnya pada masyarakat-masyarakat tradisional Indonesia. Pada masyarakat Batak di Sumatera Utara seorang laki-laki yang belum menikah tidak dilibatkan dalam upacara-upacara komersial, karena ia belum dianggap dewasa. Seorang laki-laki yang belum menikah belum dapat mengawinkan adik-adiknya. Ia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga orang tuanya walaupun usianya sudah lanjut. Dengan demikian merupakan suatu lingkungan baru dimana seseorang bertanggung jawab dan bagaimana ia bekerja sama dengan anggota keluarganya yang lain dalam membina rumah tangga.

Perkawinan harus dilaksanakan melalui pengucapan ikrar. Ikrar dilakukan dalam suatu akad nikah yang dihadiri oleh segenap kerabat dan handai taulan. Tata cara perkawinan di wilayah propinsi Nusatenggara Timur mempunyai ketentuan adat sendiri yang kalau diperhatikan menunjukkan adanya campuran pengaruh Hindu, Islam dan adat istiadat setempat yang telah melanda daerah ini sejak ratusan tahun yang lalu.

Perkawinan dikalangan rakyat jelata berbeda dengan perkawinan di kalangan pembesar-pembesar adat atau masyarakat yang mempunyai pengaruh seperti halnya raja di Jawa. perkawinan diantara para pembesar masyarakat itu sering dilakukan dengan seorang perempuan dari daerah lain. Hal ini ada kaitannya dengan tujuan kerajaan itu untuk memperluas

pengaruh dan membina persekutuannya dengan kerajaan-kerajaan lain. Di sini nampak tujuan perkawinan tidak saja untuk status sosial, tetapi mempunyai dampak politik. Pembinaan persekutuan antara masyarakat kerajaan dilakukan melalui perkawinan. Anak-anak hasil perkawinan di berbagai kampung wilayah kerajaan secara tidak langsung mengukuhkan kedudukan raja atau pembesar atau tokoh masyarakat dan aparat kerajaan pada umumnya.

Perkawinan yang ideal menurut adat penduduk di Nusatenggara Timur, adalah perkawinan di antara mereka yang masih mempunyai pertalian darah sampai sepupu tiga kali atau dalam istilah teknisnya perkawinan antara ego dengan orang yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan dirinya. Alasan dilakukan ini dalam lingkungan keluarga adalah: Untuk mendekatkan kembali ikatan kekerabatan di antara anggota keluarga. Hal ini ada benarnya mengingat perkawinan ideal adalah sepupu tiga artinya kakek atau neneknya saudara sekandung. Dapat di bayangkan kalau dari kakek-neneknya kemudian mempunyai anak dan cucu, maka antar cucu yang satu dengan lainnya tidak saling mengenal. Salah satu cara mendekatkan kembali adalah melalui ikatan perkawinan. Biasanya perkawina ideal dilaksanakan hanya di kalangan Isatana saja karena ada kaitannya dengan harta warisan.

Perkawinan antar anggota kerabat juga untuk menghindari kebocoran berita sampai mengenai krisis ekonomi kelurga itu supaya tidak diketahui orang lain. Di samping itu perkawinan ideal yang demikian untuk menghindari perceraian. Sebab resiko pasangan yang bercerai amat berat mengingat mereka hidup di antar anggota kerabatnya. Sebaliknya percekocokan yang timbul antar suami istri, dapat dislesaikan secara kekeluargaan.

Seorang yang mau menikah harus mempunyai persyaratan yang dinilai oleh anggota masyarakat yang lebih senior. Syarat-syarat untuk kawin adalah: umurnya sudah mencapai kedewasaan, dan kondisi kesehatannya memadai. Mengenai kedewasaan seseorang tidak selalu dilihat dari usia saja, tetapi juga dilihat dari kematangan jiwanya. Bagaimana ia kalau diberi tanggung jawab untuk memasuki perkawinan. Bagi perempuan, persyaratan utama yang dilihat adalah ia telah haid atau belum. Sementara itu kawin pada usia lanjut tidak dinilai bercela, tetapi laki-laki yang bujangan seumur hidup atau perawan tua sering

mendapat ejekan. Cemohan itu tidak saja berlaku pada orang yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya. Sebaliknya keluarganya itu juga merasa diri kurang dan berdosa karena tidak dapat mengurus anaknya.

Salah satu syarat perkawinan adalah kesehatan kedua pasangan. Bila di ketahui satu menderita penyakit, maka harus dirawat lebih dahulu sampai sembuh, kemudian baru menikah

Kalau diketahui salah satu mandul pasangan, maka orang tua kedua belah pihak hanya menyerahkan nasibnya kepada kuasa Tuhan. Kemandulan bukan penyebab perceraian. Hal ini karena kemandulan bagi pasangan tidak diketahui sejak dini. Biasanya penyakit itu baru di ketahui setelah berlangsungnya perkawinan.

Pembayaran maskawin dilaksanakan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mas kawin diatur berdasarkan adat dan agama. Menurut adat mas kawin ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya golongan seseorang.

Untuk pemilihan jodoh di Nusa Tenggara Timur diperlukan pertimbangan tertentu agar si laki-laki dapat menemukan jodoh yang cocok dan serasi. Untuk mencari calon istri persyaratan utama yaitu: berharta/kaya; cantik keturunan bangsawan, beradat dan beragama.

Dari empat hal tersebut diatas yang terutama ialah beradat dan beragama. Meskipun seorang perempuan itu miskin, tidak cantik atau budak sekalipun, tetapi ia memegang adat dan agama, itulah yang menjadi pertimbangan utama. Mengenai proses mencari jodoh terjadi bila seseorang laki-laki menjelang dewasa. Orang tua mulai memperhatikan gadis-gadis yang cocok untuk dikawinkan dengan anak laki-lakinya. Dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan kemenakan-kemenakan dalam lingkungan keluarganya. Bila sudah ada calon yang dimaksud maka untuk meyakinkan orang tua dan anak laki-laki yang bersangkutan, biasa diadakan suatu acara bebas muda-mudi di rumah orang tua pihak laki-laki dan pada kesempatan itu gadis yang bersangkutan turut diundang.

Dalam acara ini pemuda dan pemudi saling bertemu, diperhatikanlah sikap dan tingkah laku si gadis, tutur katanya dan sebagainya. Bila orang tua pihak laki-laki dan anak mereka telah sepakat

untuk memilih seorang perempuan tertentu untuk dikawini maka dapat dilanjutkan dengan peminangan menurut prosedur yang berlaku.

Upacara yang dilakukan sebelum perkawinan adalah upacara peminangan. Tujuan upacara ini adalah agar ada kepastian untuk dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya pinangan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan menjadi resmi dan disaksikan oleh orang tua dan kaum keluarga kedua belah pihak. Upacara peminangan pada masyarakat di Nusatenggara Timur, pada waktu yang baik dan biasanya pada waktu pagi hari. Dilakukannya pada waktu pagi hari dimana matahari sementara naik mengandung kepercayaan agar calon suami istri lanjut usianya, mendapat banyak rejeki yang halal dan sebagainya.

Apabila telah dilakukan peminangan, maka pihak laki-laki berkewajiban untuk mengantarkan kepada pihak perempuan melalui *tolowea* pemberian yang disebut *katindana oda* dan *bakena kau*. *Bakena kau* artinya buah-buahan kayu. Mereka yang tidak mampu mengantarkan buah-buahan, dapat diganti dengan uang yang jumlah sebagai berikut : 5 boka (Rp. 6,- dulu) bagi kaum bangsawan, 3 boka (Rp. 360,- dulu) bagi kaum Walaka, bagi kaum papara berlaku ketentuan setempat.

Dengan pengantaran buah-buahan, ada kepercayaan serta permohonan doa agar kedua muda-mudi akan mendapat anak (akan berbuah). Buah-buahan yang diterima dibagi-bagikan kepada tetangga dan kaum keluarga.

Antara laki-laki dan perempuan yang bertunangan ada hak dan kewajiban mereka masing-masing. Bila pihak laki-laki akan merantau atau ke luar desa untuk beberapa lama waktunya, ia harus memberitahukan hal itu kepada tunangannya. Perempuan yang telah diberitahukan, berkewajiban menurut adat untuk mengantar bekal. Bekal itu berupa kue-kue atau makanan lain yang tahan lama.

Bila laki-laki itu kembali dari pelayanan, ia memberikan oleh-oleh kepada tunangannya. Bila yang akan berlayar itu perempuan, maka pihak laki-laki wajib pula memberikan sesuatu berupa kebutuhan si gadis selama perjalanan. Pemberian ini umumnya berupa bedak, minyak wangi, kain baju dan sebagainya. Pemberian itu sebagai rasa tanda cinta kaish pihak laki-laki kepada tunangannya.

3.4 Pemerintahan Kampung

Mayoritas penduduk Nusatenggara Timur adalah masyarakat pedesaan. Sebagai suatu daerah kepulauan dengan keadaan topografis pada masing-masing pulau yang sangat menyulitkan komunikasi, maka tumbuh berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki ciri-ciri budaya tersendiri.

Jauh sebelum dikenalnya sistem pemerintahan moderen berupa aturan hukum dan perundang-undangan, masing-masing kelompok masyarakat di daerah ini sudah mengenal seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, baik dalam mengatur interaksi antarwarga masyarakat maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber dayanya. Dalam melaksanakan norma-norma tersebut dikenal pula lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus sebagai pengawas tingkah laku warga masyarakat berdasarkan norma-norma tersebut.

Dewasa ini norma-norma sosial tradisional serta lembaga-lembaga adat secara formal tersisih oleh aturan-aturan hukum dan lembaga pemerintahan yang baru. harus diakui bahwa baik norma-norma maupun lembaga-lembaga tradisional itu dalam banyak hal sebenarnya masih dibutuhkan, baik dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial maupun dalam upaya menjamin keserasian hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Tersisihnya norma-norma sosial tradisional serta fungsi lembaga-lembaga adat dapat menimbulkan kegoncangan tata kehidupan sosial. Pada satu pihak struktur sosial tradisional dengan perangkat normanya menjadi longgar oleh perubahan-perubahan akibat modernisasi. Sementara di pihak lain aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang baru belum dapat dipahami secara luas oleh masyarakat sehingga belum dapat digunakan sebagai pedoman baru dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya timbul berbagai penyimpangan perilaku yang bukan hanya tidak sesuai dengan norma-norma sosial tradisional tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang baru itu.

Dalam kondisi transisi ini tampak bahwa dalam banyak kasus pelanggaran norma-norma sosial maupun sengketa antarwarga masyarakat dan juga perangkat pemerintahan formal sendiri masih

cenderung mencari alternatif pemecahan melalui aturan-aturan dan lembaga tradisional. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan beberapa kasus dan upaya penyelesaiannya.

Pertama, penyimpangan perilaku para pemuda di desa Rubit, Kabupaten Sikka. Kasus ini terwujud dalam perkelahian antarkelompok pemuda dan pencurian hasil kebun.

Sekitar satu dekade terakhir, masyarakat desa ini mengalami perubahan yang dapat dikatakan cukup drastis dalam kehidupan sosial budaya. Perubahan ini berawal dari gerakan membudidayakan tanaman ekspor sejak awal tahun 1970-an. Sebelum itu masyarakat desa Rubit hidup dari perladangan berpindah. Budidaya tanaman ekspor menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, terutama sebagai akibat pergeseran nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman berperilaku.

Longgarnya adat istiadat akibat kurang dihayatinya norma-norma tradisional, terlihat dalam fenomena perilaku yang menyimpang di kalangan pemuda, misalnya perkelahian antarkelompok pemuda dan pencurian hasil kebun. Tingkah laku destruktif para pemuda ini sudah cukup lama menjadi topik perbincangan dan keluhan masyarakat.

Perkelahian antar kelompok pemuda merupakan suatu gejalasosial yang meresahkan masyarakat desa Rubit serta desa-desa tetangganya. Biasanya perkelahian terjadi ketika ada pesta keluarga atau keramaian umum tertentu, dan kadang-kadang di pasar. Di tempat-tempat seperti ini masing-masing pemuda datang dengan membawa parang panjang dan berlagak sebagai jagoan mencari tandingan. Biasanya mereka berkelompok sekitar empat atau lima orang umumnya dari dusun yang sama. Bila timbul persoalan kecil saja dengan pemuda dari kelompok lain, akan terjadi perkelahian atau saling menantang untuk berkelahi. Kalau waktu itu sempat dilerai, mereka menantang pada kesempatan lain.

Dalam suatu pesta pernikahan atau pesta keluarga lainnya, seorang pemuda yang ditolak permintaannya untuk berdansa dengan seorang gadis akan marah-marah dan menantang siapa saja yang bersedia melayaninya. Pemuda lain, terutama yang mempunyai hubungan dengan gadis itu akan melayani tantangan itu.

Kasus lain dari penyimpangan perilaku pemuda di desa Rubiit adalah pencurian hasil kebun, terutama coklat (cacao). Dahulu pencurian diancam dengan denda adat yang sangat memalukan. Dengan tersisihnya norma-norma yang berkaitan dengan hal itu, mencuri hasil kebun orang dianggap sebagai suatu perbuatan yang dengan mudah dapat dilakukan. Bila tertangkap, yang bersangkutan biasanya hanya dinasehati oleh kepala dusun (pamong) atau kepala desa. Kadang-kadang disertai satu atau dua kali tamparan, lalu disuruh pergi dengan peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bentuk sanksi seperti ini oleh pemuda nakal tersebut dianggap terlalu ringan sehingga tidak membuat mereka jera. Setiap kali mereka perlu uang perbuatan jahat itu diulangi lagi. Rupaya pertimbangan mereka, kalau tertangkappun paling-paling hanya dit ampar satu atau dua kali dan diberi nasihat.

Kesadaran akan melemahnya bentuk-bentuk penyelesaian masalah yang baru dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul akhir-akhir ini, khususnya yang berhubungan dengan penyimpangan perilaku pemuda, kepala desa dan para kepaladusun akhirnya berpaling ke bentuk-bentuk pengendalian sosial tradisional. Untuk menanggulangi masalah perkelahian antar kelompok pemuda, kepala desa Rubit bersama para kepala dusun dan tua-tua adat sepakat untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok gotong royong sebagaimana dikenal ketika masyarakat desa ini masih hidup berladang. Bentuk-bentuk kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, antara lain dengan membersihkan atau merawat tanaman di kebun secara bergilir. mengadakan arisan dengan tujuan membangun rumah-rumah bagi penduduk yang tidak mampu. Demikian pula memberi dukungan dana bagi para pedagang modal lemah di samping memberi pelajaran ketrampilan bagi orang-orang yang berminat menjadi tukang batu atau kayu. Di samping itu juga untuk saling membantu dalam kegiatan atau keperluan pembayaran mas kawin dan pesta-pesta keluarga.

Untuk menanggulangi kasus pencurian hasil kebun, akhirnya disepakati untuk memberlakukan kembali bentuk-bentuk penyelesaian masalah dengan sanksi tradisional. Salah satu diantaranya adalah dengan mengenakan denda adat yang disebut *abo ihin* atau *liko ihin lepeng dolo*.

Bentuk lainnya adalah dengan menghidupkan kembali tradisi *tada*. Masing-masing penyelesaian ini menuntut denda adat yang sangat berat sehingga pencuri akan jera mengingat nilai barang curian yang hanya sedikit pun harus ditebus dengan denda seekor babi besar, sejumlah beras dan arak (bahannya dari nira lontar yang disuling sampai betul-betul beralkohol kadar tinggi).

Lebih dari itu acara peradilan adat biasanya mengundang perhatian banyak orang sehingga beban moral berupa rasa malu terasa sangat berat bagi si pelakunya. Dengan lain perkataan, sanksi tradisional yang dijatuhi pada setiap pelaku kejahatan baik pidana maupun perdata selalu terwujud pada harga diri. Sanksi ini ternyata sangat efektif bagi berlangsungnya sistem pemerintahan tradisional atau lokal, sehingga mekanisme hubungan antar warga tetap terjamin. Lebih dari itu pemahaman warga tentang arti pentingnya menjaga lingkungan alam tetap dipertahankan. Oleh karena itu sanksi tradisional khususnya dan mekanisme pemerintahan tradisional umumnya sampai sekarang masih tetap dipertahankan walaupun sudah banyak instruksi-instruksi hukum atau pemerintahan yang bersifat nasional yang sudah masuk wilayah ini.

Kasus pembebasan tanah di desa Moni, Kabupaten Ende merupakan terminal kegiatan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Ende karena letaknya paling dekat dengan danau triwarna Kelimutu. Danau ini, sesuai kebijakan pemerintah, dijadikan obyek wisata utama di Kabupaten Ende. jarak antara pusat desa dengan puncak gunung Kelimutu di mana terdapat danau ini sekitar 12 kilometer. Selain itu pusat desa ini juga terletak di tepi jalan raya yang menghubungkan kota Meumere di Kabupaten Sikka dengan kota Ende.

Dengan ini pemerintah daerah Kabupaten Ende sedang membangun berbagai fasilitas penunjang kepariwisataan dengan desa Moni sebagai salah satu pusatnya. Fasilitas yang di bangun antara lain berupa penginapan, rumah makan, pertamanan dan penataan kembali pemukiman serta jalan raya.

Untuk membangun fasilitas-fasilitas itu pemerintah daerah maupun pihak swasta mengalami kesulitan dalam hal pembebasan tanah. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh status hak milik perorangan

yang tidak jelas atas tanah-tanah yang hendak dibebaskan. Masyarakat desa ini (juga semua desa lain di Kabupaten Ende), pada dasarnya tidak mengenal hak milik pribadi yang mutlak atas tanah. Seluruh tanah dalam suatu wilayah persekutuan adat berada dalam otorita mosalaki, yakni lembaga penguasa tradisional setempat. Setiap keluarga pada hakekatnya hanya memiliki hak garap atas tanah yang diperoleh dari mosalaki.

Selain itu tanah garapan suatu keluarga tetap merupakan milik kolektif keluarga luas dan mosaki. Pengertian keluarga luas di sini tidak hanya meliputi saudara-saudara kandung, tetapi juga semua keluarga dari dari saudara-saudara laki-laki ayah. Memang masing-masing keluarga sudah mendapat bagiannya sendiri, tetapi bukan untuk di jual. Kalau ada keluarga tertentu menjual tanah, keluarga yang lain terutama dari garis keturunan laki-laki akan menghalangnya.

Masalah yang sering dihadapi dalam hal ini adalah kalaupun tercapai kesepakatan untuk menjual suatu bidang tanah, masing-masing pihak menuntut untuk memperoleh bagian dari hasil penjualan. Padahal tanah yang dijual adalah tanah garapan satu orang atau satu keluarga batih saja. sengketa akhirnya dapat timbul dari pembagian hasil penjualan tersebut dan akibatnya pihak yang tidak puas akan mengacaukan kembali urusan jual beli yang sebenarnya sudah selesai.

Masalah lain yang juga pernah terjadi adalah penjualan secara sepihak oleh keluarga tertentu. Rupanya karena tertarik untuk memperoleh uang dalam jumlah besar, keluarga tersebut menjual tanah garapannya tanpa sepengetahuan kerabat maupun mosalaki. Setelah jual beli secara resmi dilakukan baru timbul masalah. Pihak keluarga yang juga merasa turut memiliki tanah itu mengajukan keberatan yang menghalangi pembeli untuk memulai pekerjaan membangun fasilitas tertentu di atas tanah yang dipersengketakan tersebut.

Dalam menghadapi masalah tersebut diatas, pemerintah daerah bertindak bijaksana. Mereka tidak menyelesaikan sendiri menurut ketentuan-ketentuan hukum formal, melainkan melalui musyawarah secara tradisional dengan melibatkan perangkat penguasa tradisional yaitu mosalaki. Pemerintah daerah Kabupaten Ende dalam banyak hal memang masih memperhitungkan peranan dari para mosalaki terutama

dalam masalah-masalah yang befhubungan dengan masalah pertanian. Pemerintah daerah menyadari bahwa lembaga pemerintahan tradisional itu bagi masyarakat Lio, Ende, masih cukup berpengaruh dan disegani.

Hal ini tampak pula pada saat pemilihan kepala desa. masyarakat pada umunya masih cenderung untuk memilih kepala desa yang berasal dari keluarga mosalaki. Kecenderungan ini terutama berkaitan dengan masalah pertanian dan adat istiadat pada umumnya yang masih di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat.

Upaya lain yang di lakukan oleh pemerintah daerah setempat adalah dengan menghidupkan kembali berbagai tradisi yang cenderung mulai di tinggalkan dengan maksud untuk di jadikan sebagai penunjang industri pariwisata. Dengan adanya program pengembangan kebudayaan daerah setempat maka norma-norma sosial tradisional serta lembaga-lembaga adatnya akan tetap terpelihara. Dengan kata lain sistem pengendalian sosial tradisional akan di fungsikan kembali, setdak-tidaknya dalam batas-batas tertentu, peranan sistem ini relevan dengan derap pembangunan daerah.

Kasus lain adalah penebangan hutan secara liar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kasusnya juga terwujud akibat adanya perubahan-perubahan mata pencaharian yang memberi dampak pada sikap dan perilaku penduduknya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada masa lampau ketika masyarakat desa didaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menganut kepercayaan Halaik, daerah-daerah hutan tertentu oleh Pah Tua dilarang untuk ditebang. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat karena diyakini sebagai tempat tinggal roh penjaga hutan dan roh-roh lainnya.

Suatu perubahan besar terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika penduduk Mulau menerima agama Kristen. Dengan menganut agama Kristen berarti masyarakat mulai mengenal nilai-nilai baru yang berbeda prinsip dan pandangan dengan kepercayaan halaik.

Dalam hal pertanian, penebangan hutan secara liar biasanya dilakukan di daerah-daerah yang penduduk sudah menganut agama

Kristen dan sudah terbuka didalam menerima pengaruh budaya luar. Keadaan ini berbeda dengan masyarakat di desa Boti, yakni desa yang paling terasing yang masih menganut kepercayaan halaik sampai sekarang.

Kelompok penganut halaik atau kelompok yang masih mempertahankan kepercayaan asli nenek moyang mereka, memandang kelompok yang beragama, Kristen sebagai orang-orang yang telah meninggalkan adat istiadat dan oleh karena itu harus tinggal diluar kampung .

Sebaliknya kelompok Kristen memandang kelompok halaik sebagai masyarakat ketinggalan zaman atau primitif. Dengan demikian timbul perbedaan pandangan terhadap konsep atau sistem nilai yang menjadi padoman tingkah laku dan hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai persoalan di dalam masyarakat. Salah satu contohnya ialah penebangan hutan secara liar tersebut.

Bagi kaum halaik di desa Boti, hutan dianggap sebagai tempat tinggal roh-roh halus, sehingga jika akan membuka suatu daerah baru untuk lahan pertanian harus berdasarkan persetujuan Pah Tuah dengan diikuti serangkaian upacara . Sedangkan bagi pemeluk agama Kristen hutan adalah ciptaan Tuhan yaang harus dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Untuk mereka menebang hutan-hutan sebagai lahan pertanian yang secara periodik dilakukan (mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam berpindah) adalah hal yang wajar. Akan tetapi banyak dari kalangan petani ini sudah mulai melakukan penebangan tanpa perhitungan hanya dilandasi mengejar keuntungan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungannya. Hal ini ada kaitannya juga dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan sumber makan sehari-hari. Akibat yang seolah-olah tidak mungkin dihindari adalah semakin gundulnya daerah-daerah perbukitan, munculnya tanah-tanah kritis, yang justru harus dihindari agar kesejahteraan penduduk setempat terjamin.

Untuk menghijaukan atau menghutankan kembali daerah yang gundul sebagai pencegahan bahaya terjadinya longsor atau banjir yang tak terkendali pada daerah-daerah yang di anggap rawan, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengadakan kegiatan

penghijauan. Di samping itu ditetapkan sejumlah peraturan tentang larangan menebang hutan pada daerah-daerah tertentu.

Walaupun pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah mengeluarkan peraturan untuk mencegah penebangan hutan secara tidak terbatas, namun masih juga terjadi pelanggaran. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah mengambil kebijaksanaan baru yaitu dengan melaksanakan sumpah adat yang dikenal dengan nama *aan tonis nekmese* (kesepakatan adat untuk melestarikan lingkungan alam dan margasatwa). Sumpah adat ini dilaksanakan melalui suatu upacara yang dihadiri oleh aparat pemerintah daerah dan seluruh ketua adat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Upacara ditandai dengan pengambilan sumpah oleh ketua-ketua adat diikuti dengan penanaman kepala kerbau sebagai lambang persatuan serta pemasangan papan yang bertuliskan sumpah adat.

Kebijaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan sumpah adat ini memberi pengaruh positif bagi usaha pelestarian lingkungan alam karena masyarakat yakin akan kebenaran sumpah tersebut dan takut akan akibat yang timbul apabila terjadi pelanggaran.

BAB IV

LEMBAGA TRADISIONAL DAN MEKANISME KEKUASAAN POLITIK

4.1 Mekanisme Kekuatan dan Kekuasaan

4.1.1 Desa Rubit, Kabupaten Sikka

Secara tradisinal penduduk desa Rubit mengenal lembaga sosial desa yang disebut *dua moan watu pitu*. Upacara sehari-hari *ata dua moan* untuk menyebut orang atau pemuka adat yang mengurus lembaga itu.

Ata dua moan berperan mengatur keselarasan hubungan antara anggota masyarakat dan antara manusia dengan lingkungannya. Lembaga adat ini sampai sekarang masih mempunyai kekuasaan untuk menentukan sejauh mana areal perladangan dapat di manfaatkan penduduknya. Sebaliknya, lembaga ini juga menentukan sejauh mana areal lahan yang harus di pelihara sebagai hutan larangan. Siapapun yang melanggar ketentuan dari adat itu, bisa dikenakan sanksi adat.

Seseorang yang melanggar aturan adat, seperti membuka lahan yang dikeramatkan akan mendapat sanksi yang disebut *ru tuan*, artinya pemulihan kembali hutan yang telah di rusak itu. Orang yang telah

melanggar ketentuan adat dikenakan sanksi berupa penyerahan hewan korban seperti babi dan arak untuk upacara yang disebut *toma ai tali*. Upacara ini fungsinya membina kembali hubungan yang selaras dengan alam. Sebenarnya upacara ini merupakan perwujudan dari upaya penduduk untuk mintah perlindungan dari kekuatan supernatural agar tidak terkena bencana alam, seperti hujan yang tak henti-hentinya, kemarau panjang atau longsor.

Kewenangan *ata dua moan* juga mencakup pencegahan daerah-daerah yang tidak boleh digarap penduduk. Di daerah skitar mata air tidak boleh digarap. Pohon-pohon disekitar itu tidak boleh di tebang alasannya disitu bermukim roh-roh. Penduduk setempat menyebutnya *olan piren* atau tempat larangan.

Dua moan watu pitu juga berfungsi sebagai lembaga peradilan. Lembaga ini menyelesaikan persengketaan diantara warga. Misalnya terjadi kasus pencurian, perkosaan, penculikan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Sebagai lembaga peradilan, *dua moan watu pitu* berkuasa untuk menjatuhkan sanksi bagi warga yang melanggar. Dalam hal persengketaan antara warga mereka bertindak sebagai penengah dan pendamai. Dalam hubungan dengan fungsi lembaga ini sebagai lembaga peradilan ada istilah *lahi lekang* yang berarti mengurai. Dalam hal ini pelanggaran maupun persengketaan itu dianggap sebagai suatu yang kusut yang harus diuraikan. Ungkapan adat yang lebih simbolis dalam kaitan ini ialah *puter mudeng doto molo*. Ungkapan ini ialah menegaskan kebenaran dan keadilan.

Ata dua moan yang mengatur perawatan kebersihan ditempat-tempat umum seperti tempat upacara atau tempat pertemuan yang di sebut wisung - wangsar. Juga halaman rumah atau den denak dirawat sebaik - baiknya karane nampak oleh umum. Karena nampak oleh warga lainnya, maka halaman rumah seseorang akan selalu dibersihkan oleh yang empunya supaya tidak terjadi cemohan.

Dua moan watu pitu juga berfungsi sebagai pemersatu anggota masyarakat. Sarana pemersatu itu antara lain melalui apa yang disebut utun omok atau berkumpul dan berhimpun, untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. *Ata dua moan* juga mengajak warga yang tinggal terpisah dari pemukiman induk supaya bergabung.

Biasanya da beberapa warga yang membangun rumahnya jauh dari kampung, mereka membangunnya di dekat ladang mereka.

Bila ada warga yang berselisih atau bertengkar, mereka berperan sebagai juru damai dengan mengajak kedua pihak menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Biasanya perselisian itu, dengan campur tangan ata dua moan, dapat di atasi dengan apa yang disebut bura dame, yaitu suatu upacara kecil untuk mengukuhkan niat baik kedua belah pihak untuk berdamai.

Ata dua moan juga mengatur warga desa untuk menjaga lingkungannya. Mereka yang menantikan aturan - aturan untuk menjamin terpeliharanya keamanan, baik bagi warga kampung secara keseluruhan maupun bagi masing - masing keluarga. Contohnya seorang tamu harus melapor ke Ata dua moan, walaupun tamu itu adalah saudara dekat salah satu warganya. Apalagi kalau tamu itu tinggal di desa yang bersangkutan dalam waktu yang relatif lama.

4.1.2 Desa Moni, Kabupaten Ende

Sementara itu penduduk desa moni mengenal lembaga sosial tradisional yang di sebut mosalaki. Lembaga initerdiri dari orang - orang tertentu yang berdasarkan keturunan menempati kedudukan utama dalam masyarakat. Mereka memegang peranan penting dalam adat istiadat. Mereka juga merupakan pengusaha atas seluruh tanah persekutuan dalam kawasan tertentu. Karena itu kewajiban - kewajibannya memperoleh hak garap atas tanah secara turun temurun. Faiwalu anakalo dalah golongan lapisan masyarakat paling bawah yang terdiri atas janda dan anak yatim piatu. Dalam upacara - upacara adat golongan ini di bebaskan dari kewajiban - kewajiban dalam bentuk materi - meteri seperti mencari beras, ternak dan arak.

Mosalaki memegang peranan sentral dalam pemeritahan tradisional. Golongan ini yang mengendalikan kegiatan anggota masyarakatnya, seperti dalam hal pemeliharaan sumber daya alam, keamanan lingkungan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan warganya.

Para anggota mosalaki mengatur mengatur pembagian tanah garapan. Mereka juga menetapkan daerah mana yang boleh dijadikan

areal pertanian, bagian mana yang menjadi areal peternakan, dan bagian mana yang tak boleh di garap penduduk. Penduduk tidak diperkenankan membuka lahan pertanian atau perladangan baru tanpa seizin dari mosalaki.

Para mosalaki juga mengatur pemeliharaan sumber daya air baik untuk kepentingan air baik untuk kepentingan air minum maupun untuk pengairan. Perlindungan hutan disekitar sumber air dilakukan oleh mosaaki dengan cara melarang siapa saja untuk menebang pohon atau membuka lahan di sekitarnya. Penyaluran dan pemeliharaan saluran air ke pematang - pematang di bawah ketentuan mosalaki.

Fungsi mosalaki dalam hal ini adalah merupakan suatu lembaga sosial yang multi fungsi. Lembaga ini yang menetapkan berbagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus merupakan pengawas terhadap pelaksanaannya. Terhadap pelanggaran aturan - aturan itu mosalaki berfungsi sebagai lembaga peradilan adat.

Dalam bidang ekonomi, mosalaki adalah penguasa atas seluruh tanah pertanian. Mosalaki yang menetapkan siklus kegiatan bercocok tanam mulai dari menyiapkan lahan sampai panen dengan seluruh rangkaian upacara.

Mosalaki juga berkuasa atas segala upaya pemeliharaan kebersihan lingkungan, baik dalam skala kepentingan warga desa maupun skala kepentingan setiap rumah tangga.

Penduduk Moni secara tradisional mengenal aturan serta upaya untuk memelihara keamanan lingkungannya. Dalam hal ini mosalaki yang menjadi penanggung jawab utama baik dalam menentukan aturan atau kebijaksanaan yang berhubungan dengan peliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat maupun untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang datang dari luar. Begitu pula juga terjadi kasus gangguan keamanan, baik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri maupun yang di sebabkan dari luar, maka mereka akan mencari upaya untuk menyelesaikannya.

Mosalaki sebenarnya adalah simbol pemersatu. Simbol ini mengikat penduduk dalam setiap kegiatan, mulai dari pemilihan tanah pertanian, pengaturan batas-batas perumahan, sampai dengan rangkaian upacara-upacara besar yang diselenggarakan oleh desa.

4.1.3 Desa Boti, Kabupaten Timor Tengah

Masyarakat Timor Tengah terbagi atas tiga golongan yaitu Usif, Amaf-Meo, dan Tob. Golongan Usif adalah golongan bangsawan yang merupakan pimpinan klen besar. Golongan Amaf adalah golongan yang berkuasa atas satu klen kecil yang berada di bawah Usif. Seajar dengan golongan Amaf adalah Meo yang berperan sebagai pengawas dan penjaga keamanan. Kelompok ini merupakan kelompok orang-orang yang gagah berani dan mahir bertempur. Tugas utama mereka adalah berperang dan mempertahankan kampung. Terakhir adalah golongan rakyat yang disebut Tob yang terdiri atas keluarga-keluarga yang kedudukannya dibawah Amaf.

Perkembangan dewasa ini telah membawa perubahan dalam masyarakat desa Boti. Pada saat sebelum masuknya agama Kristen, pengakuan dan ketaatan terhadap Benu sebagai Usif sangat kuat dan dalam segala hal Usif yang menjadi penentu. Pengakuan dan ketaatan ini semakin berkurang karena sebagian penduduk desa Boti telah menjadi penganut agama Kristen Protestan dan Katolik.

Para pemeluk agama Kristen memandang tradisi kelompok penganut Halaik sebagai praktek berhala. Dewasa ini para penyiar agama menjadi satu lapisan baru dalam stratifikasi sosial masyarakat. Pengaruh kelompok ini sangat besar dalam berbagai hal. Dalam perkawinan ritus-ritus keagamaan telah menjadi bagian penting dari keseluruhan tahap upacara. Banyak upacara tradisional yang menurut kelompok agama kristen merupakan upacara berhala yang harus ditinggalkan.

Peranan pemerintahan formal desa Boti sedikit mengalami halangan karena kelompok penganut halaik masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap nune benu dan kepercayaan ini rasanya sulit untuk ditinggal mereka. di samping itu kepala desa Boti bertempat tinggal diluar wilayah desa Boti sehingga tidak dapat melakukan pengawasan sosial secara langsung.

Berkenan dengan pemerintahan tradisional, tokoh-tokoh masyarakat masih mempunyai peranan penting walaupun terjadi beberapa pergeseran norma akibat perkembangan dewasa ini. Pengaruh usif nune benu di kalangan kelompok halaik masih sangat kuat dan

dalam berbagai hal di adalah tokoh satu-satunya yang berkuasa mengambil keputusan.

Demikian pula para penganut agama Kristen masih memandang nune benu sebagai pah tuah atau elit penguasa tradisional. Namun dalam banyak hal mereka lebih cenderung menurut petunjuk dari pemerintah dan para tokoh agama. Walaupun demikian kekuatan dan kuasa adat masih tetap dipakai dalam mengendalikan kehidupan masyarakat desa Boti.

Seperti yang telah disebutkan diatas, lapisan kepemimpinan masyarakat yang terdiri atas usif, amaf dan meo masing-masing mempunyai fungsi dalam masyarakat walaupun hanya dalam batas-batas kepentingan lokal.

Semua tanah adalah milik puh tua dan segala kegiatan yang menyangkut penggunaan tanah harus melalui ijin pah tuah. Di bawah pah tuah masih terdapat aparat-aparat adat yang berperan dalam kegiatan pembukaan suatu lahan baru seperti ana amne yang bertugas sebagai imam upacara bertindak sebagai pemimpin doa agar lahan ladang baru memberikan hasil yang melimpah. Sesudah itu baru sipetani dapat menggarap lahan pembagiannya. Sedangkan para meo bertugas untuk mengadakan pengawasan agar seorang petani benar-benar menggarap tanah atau lahan yang telah dibagikan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap perturan yang telah ditetapkan dalam penggarapan tanah. Hasil panen sebagian dipersembahkan kepada usif sebagai tanda kesetiaan dan pernyataan bahwa tanah garapannya telah memberikan hasil.

Ketentuan ini sesungguhnya berfungsi sebagai pengendali sosial agar setiap warga tidak kekurangan sumber pangan, tetapi dilain pihak mampu menjaga keseimbangan lingkungan alamnya.

4.2 Adat Istiadat dan Sistem Kekuasaan

Mayoritas penduduk Nusatenggara Timur tinggal di wilayah pedesaan dengan mata pencahariannya yang bertumpu pada alam sekitarnya. Mereka mengolah hutan menjadi lahan-lahan perladangan yang siap dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Ladang adalah pusat kegiatan penduduk Nusatenggara Timur pada umumnya.

Setiap kegiatan selalu dikaitkan dengan arti pentingnya keberadaan ladang.

Mengubah sebuah hutan menjadi sebuah lahan perladangan yang bermanfaat bagi penduduk sama pentingnya dengan bagaimana mereka memelihara ladang itu supaya tidak cepat hancur. Titik sentral kegiatan ini dalam kenyataannya tidak langsung tampak dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali gejala yang tampak menunjukkan bahwa seolah-olah ladang itu tidak terlampau penting bagi penduduk setempat. Apalagi setelah kelihatan pengaruh pembangunan segala bidang yang didengungkan setiap hari oleh pemerintah. Sehingga gejala yang tampak justru akibat adanya pengaruh pembangunan tersebut dari pada memahami inti dari adat istiadat atau kebudayaan penduduk di Nusatenggara Timur.

Coba diperhatikan bahwa masalah-masalah yang sering kali nampak dan diperbincangkan baik di kalangan aparat pemerintah setempat maupun di kalangan warga berkisar pada (1) masalah sumber daya alam (2) masalah ketertiban sosial (3) masalah kebersihan lingkungan (4) masalah keamanan lingkungan, dan (5) masalah persatuan dan kesatuan warga. Masalah-masalah seperti itu sebenarnya dapat dilihat sebagai suatu pola perilaku masyarakat manusia dalam menghadapi lingkungannya. Upaya yang dilakukan adalah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi juga memperhitungkan tingkat kebutuhannya. Upaya manusia untuk mencari keseimbangan antar tingkat kebutuhan dan penyesuaian terhadap lingkungan itu dilakukan dengan menciptakan berbagai macam aturan. Aturan-aturan itu digunakan sebagai pedoman untuk bergaul antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Pada dasarnya penciptaan aturan bagi perilaku manusia tidak saja dilakukan secara sadar tetapi juga tanpa sadar. Sementara itu tidak semua aturan yang mengatur perilaku manusia berlangsung secara seimbang. Setiap aturan itu dalam kenyataannya mempunyai bobot yang berbeda. Bobot aturan itu bergantung pada konteks sosial yang berlaku. Seorang individu yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat tidak ditentukan oleh dirinya, melainkan oleh individu-individu yang ada di sekelilingnya. Karena itu tinggi atau rendahnya

kedudukan seorang individu tidak saja ditentukan oleh dirinya sendiri tetapi juga ditentukan oleh orang lain.

Seorang individu dengan kedudukan yang tinggi dan mempunyai kekuatan dan kekuasaan atas orang lain adalah karena adanya aturan . Aturan itu memungkinkan bagi dirinya untuk berkuasa atas orang lain . Bahkan dengan aturan itu ia mampu memberi ganjaran dan sanksi atas orang lain.

Pada masyarakat-masyarakat yang masih dikategorikan bersahaja (tribal), seorang yang berkuasa mampu menciptakan hubungan-hubungan yang multipleks. Artinya hubungan yang dilakukannya atas orang lain mencakup keseluruhan hubungan yang ada dilingkungannya. Misalnya disamping adanya hubungan kekerabatan baik karena darah maupun perkawinan, juga mencakup hubungan kerja, keagamaan dan lain sebagainya. Oleh karena sifat organisasi sosial masyarakat yang masih bersahaja itu sederhana, maka corak hubungan-hubungan yang terjadi juga bersifat sederhana. Dalam masyarakat seperti itu seorang yang sudah ternoda sulit untuk memperbaiki nasibnya. Seolah-olah orang itu tidak ada baiknya. Jadi kebaikan dan prestasi orang itu akan hilang sejalan dengan ternodanya ia dihadapan warga lingkungannya.

Kesepakatan untuk membentuk aturan yang di buat dan dipahami di antara mereka memungkinkan kelompok masyarakat manusia mengembangkan gagasan-gagasannya. Kesepakatan di kalangan mereka memungkinkan masyarakat manusia mengembangkan kreatifitsnya yang pada gilirannya di gunakan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan demikian melalui organisasi sosial yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka manusia mampu menembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Organisasi sosial yang di kembangkan masyarakat manusia mencakup kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Kepentingan-kepentingan manusia itu seringkali tumpang tindih, atau sulit untuk dipisahkan. Namun untuk memudahkan dapat dilihat bahwa kepentingan manusia itu seringkali tidak bisa diperoleh dengan wajar. Tidak jarang kepentingan itu menjadi kebutuhan yang dasar yang hanya bisa diperoleh melalui kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan itu hanya bisa dilakukan kalau berdasarkan aturan-aturan yang sudah dipahami

oleh anggota masyarakat yang lain. Kekuatan dan kekuasaan seseorang seringkali perlu dibuat resmi atau formal agar tidak terjadi kekacauan di kalangan anggota masyarakatnya.

Keteraturan dan ketertiban itu ternyata perlu dalam suatu tatanan masyarakat manusia. Karena itu manusia butuh adanya kekuatan dan kekuasaan yang formal yang mampu mengatur dan mengorganisasi seluruh anggotanya. Melalui aturan formal seluruh anggota mengakui adanya pemimpin dan yang dipimpin. Mereka dengan sadar memilih pemimpinnya, menciptakan lembaga-lembaga yang mengatur dirinya dan memberi ganjaran dan sanksi bagi orang-orang yang berjasa maupun menyeleweng. Adanya pemimpin dan yang dipimpin, adanya lembaga-lembaga yang mampu mengatur warganya serta adanya kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasi setiap anggota yang ada dapat disebut suatu pemerintahan. Pemerintahan yang hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu, maka ruang lingkup pemerintahan itu berlaku dan diterima oleh seluruh lingkungan masyarakat, maka pemerintahan itu bersifat universal.

Di Nusa Tenggara Timur, banyak pemerintahan kampung yang sampai sekarang masih efektif diberlakukan pada kalangan penduduknya. Keefektifan ini karena pemerintahan nasional Indonesia belum mampu mendefinisikan betul ganjaran dan sanksi yang bisa dijatuhkan pada anggota masyarakat itu. Karenanya disamping sudah mulai dipopulerkan hukum dan pemerintahan yang bersifat nasional, pemerintahan yang bersifat lokal atau tradisional masih dianggap perlu untuk digunakan. Melalui pemerintahan tradisional itu sebenarnya para anggota masyarakat dipersiapkan untuk memperoleh sejumlah nilai baru, yakni nilai tentang kekuatan dan kekuasaan yang berlandaskan pada peraturan-peraturan yang bersifat nasional.

Jauh sebelum dikenalnya sistem pemerintahan nasional atau moderen, yang berupa aturan-aturan hukum dan undang-undang, masing-masing kelompok masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur sudah mengenal seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber dayanya. Dalam pelaksanaan norma-norma tersebut dikenal pula lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus

sebagai pengendali tingkah laku warga masyarakat dengan norma-norma itu sebagai pedomannya.

Sistem pemerintahan tradisional dapat terdiri dari seperangkat aturan, norma atau adat istiadat. Semua ini mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warganya.

Masyarakat desa Rubit di Kabupaten Sikka secara tradisional mengenal lembaga sosial desa dengan nama *dua moan wa tu pitu*. Pemuka-pemuka masyarakat yang duduk dalam lembaga ini disebut *ata dua moan*. Lembaga ini menangani pranata-pranata sosial, ekonomi, budaya maupun yang berkaitan dengan lingkungan alam.

Dalam hubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam, lembaga ini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali terhadap segala aturan, norma maupun tradisi yang berkaitan dengan pertanian dan perladangan, disamping pemeliharaan terhadap sumber mata air. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang sudah ditetapkan, *ata dua moan* akan memberikan sanksi adat bagi mereka yang melanggar. Bentuk sanksinya senantiasa disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Dua moan watu pitu berfungsi pula sebagai lembaga pengadilan. Dalam konteks ini, lembaga tersebut berfungsi sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk mengendalikan ketertiban masyarakat. Dewan ini mempunyai wewenang untuk menindak berbagai pelanggaran norma sosial seperti pencurian, pelanggaran susila, penganiayaan dan pembunuhan, maupun menyelesaikan persengketaan antar warga masyarakat.

Dalam hubungan dengan kebersihan lingkungan, *ata dua moan* yang bergabung didalam lembaga sosial desa ini bertindak pula selaku motivator dan juga sebagai koordinator didalam melaksanakan pekerjaan perawatan. Di samping itu dewan berhak pula untuk menegur warga yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Dua moan watu pitu juga merupakan lambang kesatuan dan persatuan warga masyarakat desa Rubit. Wujudnya dapat dilihat melalui *utun omok* yaitu duduk berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam

hal keamanan lingkungan, pemuka masyarakat ini bertugas sebagai koordinator yang menetapkan peraturan-peraturan untuk menjamin terpeliharanya keamanan lingkungan desa.

Masyarakat desa Moni di Kabupaten Ende mengenal lembaga sosial tradisional yang disebut mosalaki. Lembaga ini terdiri atas orang-orang tertentu yang berdasarkan keturunan, menempati kedudukan utama dalam masyarakat. Mereka juga memegang peranan penting sehubungan dengan adat istiadat setempat. Mereka adalah penguasa atas seluruh tanah persekutuan dalam suatu kawasan tertentu. Karena itu mereka dapat merupakan tuan tanah. Dalam upacara adat, merekalah yang menjadi pemimpin sehingga dapat pula disebut sebagai penguasa adat.

Dengan demikian nampak bahwa mosalaki merupakan suatu lembaga sosial tradisional yang menjadikan peranan sentral dalam sistem pemerintahan tradisional masyarakat setempat, baik dalam pemeliharaan sumber daya alam, pemeliharaan ketertiban sosial, pemeliharaan lingkungan hidup, pemeliharaan keamanan lingkungan, maupun pemeliharaan persatuan dan kesatuan warga masyarakat yang di dasarkan pada adat istiadat setempat.

Dalam hal pemeliharaan sumber daya alam, para mosalaki mengatur pembagian tanah garapan, menetapkan daerah mana yang boleh dijadikan areal pertanian dan padang penggembalaan, serta menetapkan daerah mana yang tetap dibiarkan sebagai hutan. Para mosalaki juga mengatur pemeliharaan sumber air termasuk menetapkan atau menjaga kelestarian hutan di mana terdapat sumber air tersebut.

Dalam hal pemeliharaan ketertiban sosial, mosalaki berfungsi sebagai lembaga pengadilan adat. Sebagai pengadilan mosalaki menetapkan berbagai aturan yang dapat menjamin ketertiban kehidupan masyarakat, sekali gus merupakan pengawas terhadap pelaksanaannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau norma-norma sosial yang telah ditetapkan, mosalaki akan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar. Wujud hukuman berupa denda adat yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Mengenai pemeliharaan kebersihan lingkungan, mosalaki menjadi motivator dan sekaligus berfungsi sebagai koordinator bagi warganya untuk melaksanakan pekerjaan membersihkan lingkungan desa, jalan-

jalan umum, maupun tempat upacara umum (keda kanga). Mereka juga memiliki wewenang untuk menegur atau mengingatkan warga yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam upaya pemeliharaan keamanan lingkungan, para mosalaki menetapkan aturan atau kebijaksanaan yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan baik keluar maupun kedalam . Lembaga mosalaki merupakan simbol persatuan warga masyarakat desa Moni yang manifestasinya dapat dilihat antara lain didalam rangkaian kegiatan cocok tanam yang dilakukan secara serempak beserta rangkaian upacara adat yang mengiringi tahap-tahap penting dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat desa Boti di kabupaten Timor Timur Selatan secara hirarkis mengenal lembaga sosial tradisinal yang terdiri dari usif, amaf dan mao. Kerja golongan ini merupakan penguasa adat setempat. Usif adalah golongan bangsawan yang merupakan pimpinan klen besar dan sebagai penguasa atas seluruh tanah wilayahnya. Sebagai elit penguasa golongan ini lazimnya disebut puh tuah amaf adalah golongan yang berkuasa atas satu klen kecil yang berada dibawah usif atau pah tuah. Sedangkan meo berfungsi sebagai pengantar ketertiban dan menjaga keamanan lingkungan.

Dari ketiga golongan tersebut tampak bahwa usif ataupun tuqah yang merupakan tokoh utama dalam sistem pengendalian sosial masyarakat setempat. Pah tuah sebagai tokoh sentral juga memiliki kekuasaan terhadap seluruh tanah di wilayahnya.

Sehubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam, pah tuah mempunyai wewenang mengatur pembagian tanah garapan, daerah mana sebagai hutan lindung, hutan produksi maupun sebagai tempat berburu. Sedangkan pemeliharaan sumber daya air berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap oem tom.

Untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang berhubungan dengan pemeliharaan ternak, setiap pemilik tanah wajib memberikan tanda kenal tersendiri bagi hewan-hewan peliharaannya.

Pemeliharaan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat di kendalikan oleh lembaga sosial tradisional setempat yaitu ketiga

golongan penguasa adat tersebut. Tokoh-tokoh utama yang duduk dalam lembaga ini mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan atau norma-norma sosial yang telah ditetapkan. Wujud sanksi berupa denda adat yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Sedangkan dalam hal yang menyangkut adat perkawinan, tokoh yang paling berperan adalah atoin amaf atau saudara laki-laki ibu.

Pemeliharaan kebersihan lingkungan di desa Boti timbul atas kesadaran masyarakat sendiri. Menjaga kebersihan merupakan warisan tradisi nenek moyang mereka yang dihubungkan dengan harga diri serta konsep-konsep yang penuh diselimuti makna religius. Sedangkan pemberian tempat-tempat umum seperti tempat upacara di laksanakan bersama-sama yang diatur oleh pemuka-pemuka masyarakat. Bantuan dari pemerintah dalam hal kebersihan lingkungan dan sanitasi dinilai positif karena bisa menyadarkan masyarakat terhadap hasil kebersihan bagi lingkungan tempat tinggal mereka.

Masyarakat desa ini mempunyai kewaspadaan yang tinggi terhadap keamanan lingkungan. Tokoh yang berperan didalam menjaga keamanan lingkungan adalah para meo. Usif sebagai penguasa tradisional didesa Boti di anggap sebagai simbol pemersatu warga masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada setiap musyawarah desa dimana pah tuah mempunyai pengaruh yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan.

BAB V

KESIMPULAN

Dewasa ini hampir tidak ada masyarakat di dunia yang tidak mengalami kontak-kontak budaya dengan masyarakat di luar lingkungannya. Meningkatnya kebutuhan hidup penduduk sejalan dengan meningkatnya kemajuan teknologi di bidang pengangkutan dan perhubungan merupakan faktor pendorong utama meningkatnya intensitas kontak budaya antar bangsa. Akibat dapat dirasakan betapa kontak-kontak budayaitu telah merangsang, mempercepat, dan memperluas cakupan tukar-manukar dan pinjam-meminjam unsur-unsur kebudayaan antar bangsa. Keadaan tersebut, tidak terkecuali, melanda propinsi Nusatenggara Timur yang sedang membangun.

Sesungguhnya sejak awal kehidupannya, betapa pun jarang dan terbatas jangkauannya, manusia telah terlibat dalam kontak-kontak dengan masyarakat tetangganya. Hal ini terdorong oleh karena upaya penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak tersedia di lingkungannya. Seringkali kebutuhan yang dihadapi suatu kelompok sosial hanya mungkin dipenuhi dari wilayah kekuasaan kelompok yang lain. Oleh karenanya tidak jarang mereka terlibat dalam peperangan kalau tukar-menukar barang kebutuhan tidak dapat dilakukan secara damai.

Sebenarnya, disamping upaya memenuhi kebutuhan hidup, setiap kelompok itu membutuhkan rasa aman secara fisik maupun spiritual. Biasanya cara yang ditempuh untuk menjamin rasa aman adalah menghindari kontak-kontak langsung dengan kelompok sosial lainnya, mereka membangun perkampungan yang berjauhan. Mereka sengaja membirikan adanya wilayah tak bertuan sebagai penyangga sekaligus sebagai penghambat terjadinya serbuan yang tidak terduga dan mendadak. Namun kontak-kontak antar penduduk tidak tertutup sama sekali, satu dan lain hal karna pada dasarnya mereka ingin mencari pengalaman terutama di kalangan generasi muda. Jelaslah bahwa terdorong oleh kebutuhan hubungan dagang atau ekspedisi untuk mendapatkan wanita karena adanya larangan kawin di antara sesama kelompok, maka kontak-koontak yang memungkinkan terjadi. Dengan adanya tukar-menukar barang dan jasa serta perkawinan silang kelompok itulah mereka saling menukar pengetahuan dan pengalaman maupun barang dan jasa yang merangsang terjadinya akulturasi. Dengan demikian kontak-kontak budaya secara langsung atau tidak langsung itu telah merangsang terjadinya proses perkembangan kebudayaan. Walaupun kontak-kontak budaya diperlukan untuk mempercepat perkembangan budaya, namun meningkatnya intensitas kontak budaya yang tidak terkendali seringkali menimbulkan reaksi keras diantara mereka yang terlibat. Perkembangan budaya menuntut orang-orang untuk melakukan penyesuaian baik pengembangan perilaku secara perorangan (*individual adjustment*) maupun pengembangan pranata sosial (*sicial adaptation*). Penyesuaian itu seringkali dapat menimbulkan ketegangan dan pertentangan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di lain pihak meningkatnya interaksi sosial antar panduduk yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda juga menimbulkan masalah sosial budaya yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan sistem budaya yang dianut sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali menimbulkan salah pengertian diantara mereka yang terlibat. Keadaan tersebut tidak terkecuali berlaku pada masyarakat terasing di Nusatenggara Timur. Sejak kemerdekaan banyak penduduk dari luar berdatangan kewilayah Nusatenggara Timur untuk bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta. Kehadiran mereka bukan hanya membawa unsur-unsur kebudayaan kebendaan dan non kebendaan yang merangsang proses akulturasi, melainkan juga menuntut perkembangan

pranata dan mekanisme sosial yang dapat menjamin ketertiban interaksi sosial antar penduduk setempat dan pendatang.

Upaya pembangunan dewasa ini telah menunjukkan hasilnya di seluruh pelosok tanah air, termasuk Nusatenggara Timur. Secara langsung ataupun tidak langsung di wilayah-wilayah itu telah terlibat dalam proses pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tanpa disadari, meningkatnya kesejahteraan penduduk telah menambah jenis, mutu dan jumlah kebutuhan hidup yang dihadapi penduduk setempat. Meningkatnya kebutuhan hidup itu telah merangsang penduduk setempat untuk memenuhi dengan berbagai cara tidak terbatas di lingkungan permukiman mereka. Di lain pihak, meningkatnya kebutuhan hidup penduduk itu telah merangsang orang luar untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkan barang-barang dan jasa yang diperlukan. Dengan melalui kegiatan dagang itu terjadi kontak-kontak budaya secara langsung makin intensif. Belum lagi rangsangan pengembangan kebudayaan yang ditimbulkan oleh penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru yang menuntut penyesuaian sikap dan pola tingkah laku penduduk maupun aturan-aturan dan nilai-nilai budaya sebagai pedoman. Di beberapa tempat di Nusatenggara Timur, proses akulturasi itu sudah berjalan lebih pesat berkat misi kegiatan agama Kristen maupun Katolik yang memperkenalkan unsur-unsur kebudayaan dan agama. Dengan demikian ada sementara masyarakat di Nusatenggara Timur yang telah lebih siap menghadapi peningkatan intensitas kontak kebudayaan, sebaliknya masih banyak yang tertinggal, seperti mereka yang berada di pedalaman wilayah Nusatenggara Timur ataupun di pesisir pantai yang terisolasi dari pengaruh luar. Demikian pula masyarakat-masyarakat terasing yang terdapat di Jambi, Mentawai dan Nias di sumatra maupun Baduy di Jawa. Berdasarkan survei tim Ditjarahnitra menunjukkan bahwa masyarakat di Mentawai kurang siap menghadapi arus interaksi dengan pendatang karena terlalu lama terisolasi oleh lingkungan geografis lautan, di samping tidak terlintasnya wilayah mereka dari jalur perdagangan.

Walaupun tingkat intensitas kontak budaya di antara masyarakat sukubangsa itu berbeda, dan pada gilirannya menyebabkan perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan. Setiap sukubangsa, sudah mengalami kontak-kontak budaya dengan masyarakat luar.

Studi ini bermaksud melihat bagaimana masyarakat Nusatenggara Timur melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap lingkungan baru mereka. Pengertian lingkungan baru itu tidak terbatas pada pengertian fisiknya, tetapi menyangkut pula pada norma-norma dan nilai-nilai baru yang diperkenalkan kepada mereka sebagai konsekuensi masuknya Nusatenggara Timur sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat Nusatenggara Timur bukan merupakan suatu kesatuan kebudayaan yang utuh dan terisolasi dari masyarakat lainnya yang berlandaskan pada norma-norma dan nilai-nilai masyarakatnya, tetapi berkembang menjadi masyarakat yang norma-norma dan nilai-nilainya merupakan percampuran akibat adanya saling tukar-menukar, pinjam-meminjam, dan rangsang-merangsang dengan norma-norma dan nilai-nilai diluar masyarakatnya. Pendekatan ini didasarkan atas kenyataan bahwa perwujudan perkembangan aktifitas anggota masyarakat Nusatenggara Timur telah menyerap norma-norma dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan atau wujud ideal dari kebudayaan Nusatenggara Timur tidak setiap saat diaktifkan dalam aktifitas mereka sehari-hari. Pengaktifan tergantung bermamfaat atau tidaknya dalam interaksi dilingkungan mereka yang baru. Bahkan asal usul, mitologi dan daerah asal masyarakat Nusatenggara Timur hanya digunakan sebagai salah satu kerangka acuan dan akan diaktifkan kalau di anggap menguntungkan .

Sesungguhnya identitas masyarakat itu, seperti dikemukakan oleh Barth, sifatnya askriptif karena dengan itu seseorang dikategorikan atas identitasnya yang paling umum dan mendasar, seperti tempat asalnya. Dengan demikian kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial identitas, misalnya, tempat asal, tidak selalu dimanfaatkan. Pengaktifan identitas, apapun bentuknya, tergantung pada kepentingannya dalam menghadapi kenyataan sosial. Dengan demikian orang Nusatenggara Timur dilihat sebagai suatu masyarakat yang tidak saja mewujudkan aktifitasnya berpedoman pada kebudayaan sukubangsanya, tetapi aktifitasnya itu berpedoman pada kebudayaan lokal (dimana orang Nusatenggara Timur tinggal) dan kebudayaan nasional. Dengan melihat masyarakat Nusatenggara Timur sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, maka bermamfaat atau tidaknya

identitas kesukubangsannya bergantung pada berguna atau tidaknya identitas itu dalam menghadapi kenyataan sosial untuk bertahan hidup. Kerangka berfikir yang demikian sebenarnya bukan hal yang baru. Brunner (1972) telah memperlihatkan tidak setiap saat identitas suku bangsa itu diaktifkan di setiap arena sosial. Kelompok-kelompok sosial itu hanya mengaktifkan simbol-simbol yang di perlukan proses interaksi sosial. Misalnya saja simbol-simbol yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang solidaritas ataupun untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk anggota kelompok atau bukan. Dengan demikian menjadi jelas bagi mereka siapa yang harus dan bagaimana diperlakukan dalam suatu interaksi sosial. Pengaktifan simbol-simbol itu bisa membantu ketertiban interaksi sosial dalam kontak-kontak budaya yang semakin meningkat intensitasnya, atau sebaliknya menjadi penghambat yang justru memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menghindari dampak sosial yang tidak diinginkan dalam proses pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Nusatenggara Timur, dirasakan perlu adanya penelitian guna menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun kebijaksanaan dan program-program pembangunan selanjutnya.

Menurut data yang dikumpulkan missionaris kelompok sukubangsa terbesardi Irian Jaya adalah orang Dani dan Asmat. Mereka masih tetap mengandalkan cara hidup berkebun dan meramu walaupun sudah pertumbuhan industri moderen sudah mulai nampak di wilayah Irian Jaya. Artinya tidak seluruh penduduk sukubangsa itu dapat menikmati dan memanfaatkan kehadiran perusahaan itu sejauh ini telah berusaha untuk melibatkan atau mempekerjakan penduduk lokal. Tuntutan akan keahlian dan ketrampilan bekerja merupakan hambatan yang sangat besar. Salah satu penyebab kemacetan hubungan timbal balik secara langsung ini adalah akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Sebaliknya, pihak perusahaan dalam kenyataannya tidak dapat dengan mudah menampung pekerja-pekerja yang tidak memenuhi syarat karena resiko yang besar.

Hambatan pendidikan sebenarnya tidak memutuskan sama sekali hubungan sosial antara pihak perusahaan industri dan masyarakat lokal. Hubungan timbal balik itu ada, walaupun tidak langsung. Dalam perkembangannya, masyarakat lokal telah mengembangkan keahlian

sebagai tukang kayu dengan menjual perabot rumah tangga kepada pekerja-pekerja perusahaan. Di samping itu, dengan berkembangnya wilayah perusahaan industri dengan sejumlah sarana dan prasarana seperti pasar, jalan, listrik, alat angkut telah memperbanyak jenis pekerjaan baru yang semula tidak dibayangkan oleh penduduk setempat. Lebih jauh lagi, penyediaan sarana dan prasarana ini telah merangsang penduduk setempat untuk mengembangkan pekerjaan-pekerjaan baru.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Mentawai di kepulauan Sierut Sumatra Barat maupun masyarakat Nias di Sumatra Utara, serta masyarakat Baduy di Jawa Barat. Dengan kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih sangat terbatas, di samping sifat masyarakatnya yang masih setengah mengembara serta populasinya sedikit kurang mendapat perhatian dari masyarakat pada umumnya. Kasus yang dialami baik masyarakat Mentawai maupun Buton adalah upaya untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari desakan pendatang. Hasil studi yang cukup banyak ditulis dalam literatur dalam maupun luar negeri, baik ilmiah maupun populer itu menyebutkan bahwa pembabatan hutan telah mengancam tidak saja sumber makanan mereka tetapi juga rasa aman justru di wilayah kampungnya.

Masyarakat Mentawai maupun Buton dewasa ini telah mengalami perkembangan terutama disebabkan intensifnya kontak budaya dengan pihak luar. Ada tiga faktor luar yang turut memberi warna dalam perkembangan kebudayaan Nusantara Timur seperti yang terlihat sekarang.

Pertama, kehadiran misionaris katolik maupun Protestan yang telah lama menetap di daerah itu yang telah merubah pandangan hidup masyarakat Nusantara Timur. Semula, masyarakat itu hidup penuh curiga, dan antara satu kampung dengan kampung lain hidup dengan saling menyerang. Kehadiran misionaris merubah masyarakat itu untuk hidup saling berdampingan berdasarkan saling mencintai sesuai ajaran Kristen.

Kedua, para pedagang yang berasal dari Propinsi lain di Indonesia, telah mengajarkan dan memperkenalkan penggunaan uang sebagai alat tukar di samping mengajarkan cara menghitung rugi-laba dalam perdagangan. Dengan demikian, kemampuan menghitung, menulis,

dan membaca yang diperoleh dari pendidikan misionaris dapat dipraktekan dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi mereka.

Faktor ketiga, aparat pemerintah yang telah berada di wilayah itu sebagai konsekuensi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, telah mendirikan kantor-kantor. Sejak itu, orang Irian, Mentawai dan Buton telah mengenal arti kebangsaan, bahasa Indonesia, di samping juga mengenal sejumlah atribut nasional lainnya. Dengan demikian, perkembangan kebudayaan, baik pada masyarakat suku bangsa di Irian, Mentawai maupun di wilayah Buton terjadi karena adanya kontak-kontak budaya dengan masyarakat yang lebih luas.

Secara lebih rinci satuan-satuan yang menjadi fokus penelitian adalah :

A. Sistem Mata Pencaharian/Kegiatan Ekonomi.

Keberadaan sebuah masyarakat tidak pernah lepas dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat agar keberadaan mereka dapat terus dipertahankan. Dengan kata lain, berbagai kegiatan tersebut adalah salah satu faktor utama yang menunjang kehidupan mereka dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Perlu ditekankan di sini bahwa berbagai kegiatan ekonomi tersebut di dalam kenyataannya menyatu dengan berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti aspek politik, kepercayaan, dan sistem kekerabatan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu hubungan-hubungan antara sistem ekonomi dan aspek-aspek yang lain juga akan menjadi perhatian sejauh aspek-aspek kehidupan itu mempengaruhi corak kegiatan ekonomi yang ada.

B. Agama/Sistem Kepercayaan

Agama sebagai suatu sistem kepercayaan (berikut praktek-praktek ritualnya) di dalam masyarakat yang masih sederhana merupakan aspek yang penting dikaji. Ada dua hal yang menyebabkan aspek kebudayaan ini menjadi fokus tulisan ini. Pertama, agama merupakan aspek kebudayaan yang mengalami perubahan yang signifikan sejak

suku Nusatenggara Timur diperkenalkan pada agama Katolik. Kedua, sistem kepercayaan di dalam masyarakat sederhana seperti di Nusatenggara Timur merupakan pedoman yang masih sangat kuat dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya.

Dengan demikian, agama merupakan suatu pedoman hidup yang digunakan untuk memahami dan mewujudkan tindakan dalam menghadapi lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Kuat dan masih operasionalnya sistem kepercayaan tersebut menyebabkan nilai-nilai yang tercakup di dalam sistem kepercayaan tersebut masih sangat relevan dalam mengatur berbagai kegiatan warga masyarakat Nusatenggara Timur dalam memenuhi kebutuhannya.

Deskripsi mengenai sistem kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat Nusatenggara Timur serta berbagai ritual yang terkait dengan sistem kepercayaan tersebut penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana Orang Nusatenggara Timur memahami dunianya, lingkungan sosial dan alamnya dan bagaimana Orang Nusatenggara Timur menggunakan pemahaman tersebut untuk mewujudkan tindakan di dalam menghadapi berbagai gejala (termasuk perubahan) di dalam masyarakatnya.

C. Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial.

Sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan aspek kehidupan yang penting bagi masyarakat yang tergolong sederhana (tribal). Hal ini disebabkan karena di dalam sistem kekerabatan tergantung prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku yang menjadi anggota suatu masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masyarakat tribal prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu alat terpenting yang digunakan untuk mengorganisasi berbagai kegiatan di dalam kehidupannya.

Deskripsi mengenai sistem kekerabatan dan bagaimana prinsip-prinsip yang ada di dalam sistem kekerabatan itu digunakan oleh para pelaku di dalam masyarakat sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan

pemenuhan kebutuhannya sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat yang bersangkutan mengatur kehidupannya.

D. Sistem Politik dan Pemerintahan

Aspek politik yang dikaji dalam tulisan ini berkaitan dengan hubungan-hubungan kekuatan yang diwujudkan oleh individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sebuah masyarakat. Hubungan-hubungan kekuatan itu berlangsung dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan terutama yang sesuai dengan kepentingan masing-masing individu atau kelompok yang terlibat. Sistem hubungan ini tercermin dari posisi dan status dalam struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Di dalam masyarakat sederhana seperti di Nusantara Tenggara Timur pencapaian tujuan dan cara-cara mempertahankan posisi yang telah dicapai seringkali dilandasi oleh, dan dilegitimasi melalui, kepercayaan dan sistem ritual yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain itu corak hubungan-hubungan serta pengelompokan pada masyarakat tradisional juga sangat dipengaruhi sistem kekerabatannya. Penerapan dari kekuatan yang dimiliki individu atau kelompok tertentu diatur berdasarkan sistem nilai dan norma adat, tradisi yang terwujud dalam pranata politik.

Fokus perhatian dalam tulisan ini akan diberikan kepada proses akulturasi yang terjadi dalam masyarakat setempat, khususnya dalam bidang kehidupan politik. Masuknya unsur-unsur baru dalam sistem kehidupan politik mereka telah mempengaruhi sistem politik tradisional yang berlaku sebelumnya. Tingkat pengaruh dari luar serta konsekuensi oleh pengaruh unsur-unsur baru dari luar kebudayaan mereka menjadi fokus dari tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Kebudayaan *Sistem Kesatuan hidup Setempat Daerah Nusatenggara Timur*. Jakarta : Proyek IDKD, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- _____, *Geografi Budaya Nusatenggara Timur*. Jakarta Proyek IDKD. Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1983 .
- _____, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Nusatenggara Timur*. Jakarta : Proyek IDKD. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- _____, *Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Nusatenggara Timur*. Jakarta, Proyek IPNB. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

